



PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I

# EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PRA DAN PASCA PEMEKARAN WILAYAH

STUDI KASUS DI KABUPATEN DAN KOTA  
TASIKMALAYA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I**

# **EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PRA DAN PASCA PEMEKARAN WILAYAH**

**STUDI KASUS DI KABUPATEN DAN KOTA TASIKMALAYA**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji milik Allah SWT yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, yang tidak mungkin dapat dihitung. Atas nikmat-Nya pula, Tim dapat menyelesaikan penelitian ini, karena kami yakin tanpa ijin dari-Nya kajian ini tidak akan dapat dilaksanakan.

Seiring dengan perkembangan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia saat ini, yang menunjukkan terjadinya pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kini telah diganti kembali oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu muatan dari UU tersebut adalah adanya keterbukaan bagi daerah jika ingin dilakukan pemekaran. Atas dasar itu, maka beberapa daerah melakukan pemekaran, termasuk Kabupaten Tasikmalaya menjadi dua daerah yaitu daerah induk (Kabupaten Tasikmalaya) dan daerah baru (Kota Tasikmalaya).

Meskipun pemekaran telah dilakukan oleh banyak daerah, namun evaluasi terhadap dampak dari pemekaran tersebut, baik yang dialami oleh daerah baru maupun daerah asal, belum banyak dilakukan. Atas dasar itu, kajian ini mencoba mengambil inisiatif untuk melakukan studi evaluasi terhadap kinerja beberapa indikator pembangunan setelah dilakukannya pemekaran. Indikator-indikator tersebut meliputi bidang ekonomi, sosial, dan sarana serta prasarana fisik.

Meskipun hasil kajian ini belum sempurna karena masih terbatasnya waktu sejak pemekaran itu dilakukan, sehingga kinerja pembangunan belum nampak jelas, namun sekedar trend yang terjadi, serta penegasan terhadap kondisi sebelum dilakukan pemekaran, dapat dilihat. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi daerah yang dimekarkan, maupun bagi Pemerintah Pusat dalam merespon usulan pemekaran daerah pada masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi baik pada daerah baru maupun daerah induknya.

Akhirnya, semoga hasil kajian ini bermanfaat. Kritik dan saran yang bersifat membangun, kami tunggu untuk perbaikan kajian pada masa yang akan datang.

Bandung, Nopember 2004

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Pemikiran .....	5
F. Model Penelitian .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
1. Variabel dan Indikator Variabel .....	14
2. Periode Pengamatan .....	15
3. Teknik Pengumpulan dan Sumber data .....	16
4. Teknik Analisis data .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II      TEORI DAN KRBIJAKAN PEMBANGUNAN               SERTA PEMEKARAN WILAYAH .....</b>	<b>19</b>
A. Kebijakan Pembangunan : Antar Efisiensi, Keadilan, dan Kemandirian Daerah .....	19
B. Desentralisasi, Pemekaran Wilayah, dan Kinerja Pembangunan .....	24
C. Ukuran Wilayah dan Demokratisasi : Kebijakan dan Pengalaman Negara Lain .....	30



<b>BAB III</b>	<b>PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN HASIL KAJIAN SEBELUMNYA .....</b>	<b>42</b>
	A. Latar Belakang Pemekaran .....	42
	B. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Pasca Pemekaran .....	48
	C. Gambaran Potensi Yang Dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN .....</b>	<b>77</b>
	A. Indikator Bidang Ekonomi .....	77
	1. Pemerataan Pendapatan .....	77
	2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ....	79
	B Indikator Bidang Sosial .....	84
	1. Angka Partisipasi Sekolah .....	84
	2. Angka Melek Huruf .....	86
	3. Rasio Murid Terhadap Guru .....	88
	4. Rasio Penduduk Terhadap Dokter .....	90
	C. Indikator Bidang Sarana dan Prasarana .....	92
	1. Rasio Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik Terhadap Seluruh Rumah Tangga .....	92
	2. Panjang Jalan .....	94
	D. Indikator Bidang Keuangan Daerah : Pendapatan Asli Daerah .....	96
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>99</b>
	A. Kesimpulan .....	99
	B. Rekomendasi .....	101
	1. Rekomendasi Umum (Untuk Pemerintah Pusat) ..	101
	2. Rekomendasi Khusus (Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya) .....	102

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara pemerintah Pusat dan Daerah, kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau urusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi lebih mengutamakan efisiensi, sementara itu pendekatan desentralisasi lebih mengedepankan kemandirian daerah dan keadilan ketimbang efisiensi. Dalam konteks kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak awal periode pembangunan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis, artinya pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi dengan keadilan dan kemandirian daerah. Dengan demikian, maka bobot pembagian kewenangan yang dianut merupakan campuran sehingga melahirkan asas penyelenggaraan pembangunan yang disebut dekonsentrasi dan desentralisasi.

Dalam perjalanannya, penekanan dalam orientasi pembangunan mengalami dinamika. Ketika penyelenggaraan pemerintahan didasarkan kepada UU Nomor 5 Tahun 1974, pendulum penyelenggaraan pembangunan lebih



mengutamakan sentralisasi, karena yang menjadi sasaran utama dari strategi pembangunan waktu itu adalah efisiensi, dan efisiensi diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan paradigma *Pareto-Optimal*. Kemudian, sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah, bukan kepada efisiensi dan pertumbuhan melainkan kepada kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, pendulum penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi.

Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut, sebagaimana diberikan “keleluasaan” oleh UU 22 Tahun 1999, daerah yang merasa diperlakukan kurang “adil” yang tercermin dari distribusi pendapatan dan tingkat pengembalian kekayaan yang dimiliki ke wilayah daerahnya, berusaha untuk mengembangkan daerah baru dan memisahkannya dari induknya. Dalam hal ini, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang terpecah, menjadi Kabupaten Tasikmalaya (sebagai induknya) dan Kota Tasikmalaya (sebagai pecahannya).

Sudah barang tentu, implikasi dari terjadinya pemekaran daerah tersebut, dirasakan dalam semua dimensi kehidupan penyelenggaraan pembangunan, karena potensi yang dimiliki oleh kedua daerah hasil pemekaran tersebut tidak homogen. Daerah yang memiliki potensi lebih besar biasanya mampu meningkatkan tarap kehidupan masyarakatnya, sedangkan daerah yang memiliki potensi lebih kecil, tidak jarang malah mengalami kemunduran,

kecuali jika daerah tersebut mampu mencari solusi dengan optimalisasi potensi yang ada dan menggali potensi yang masih terpendam.

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui wawancara dengan para pejabat di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, terdapat ketimpangan yang signifikan antara potensi yang dimiliki oleh wilayah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan wilayah Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini, sebagian besar potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya sebelum dimekarkan berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Apabila hal ini benar dan berdampak terhadap penurunan kesejahteraan Kabupaten Tasikmalaya, maka pemekaran daerah yang dilakukan dapat dinilai tidak efektif, apalagi jika dikaitkan dengan kewajiban daerah induk untuk membina daerah baru, sementara kemampuan yang dimiliki oleh daerah induk jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah baru.

Atas dasar hal tersebut, kajian ini ingin mengungkap bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja pembangunan di daerah induk.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latarbelakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah dampak pemekaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Tasikmalaya?



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Adapun sasarannya meliputi:

1. Mengetahui dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Tasikmalaya;
2. Mengetahui dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja pembangunan bidang sosial Kabupaten Tasikmalaya;
3. Mengetahui dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja pembangunan bidang sarana dan prasarana dasar;
4. Mengetahui dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja pembangunan bidang keuangan daerah khususnya PAD Kabupaten Tasikmalaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan persetujuan terhadap usulan atau penetapan kebijakan pemekaran wilayah di masa yang akan datang. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melanjutkan pembangunannya pasca pemekaran wilayah.

## E. Kerangka Pemikiran

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan yang bersifat absolut yang dinikmati oleh setiap individu dan kelompok masyarakat, maupun kesejahteraan yang bersifat relatif dalam arti pemerataan kesejahteraan atau keadilan. Secara teoritis, kesejahteraan absolut dapat dipercepat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui efisiensi sebagaimana kaidah *pareto-optimal* (Richard W. Tresch, 2002). Sementara itu, kesejahteraan relatif atau keadilan dapat diakselerasi melalui pendistribusian pendapatan yang lebih merata. Secara teoritis mengenai optimalisasi kesejahteraan ini telah dikembangkan oleh Bergson dan Samuelson yang terkenal dengan *Bergson-Samuelson Curve*-nya ((Richard W. Tresch, 2002).

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah, sebagai akselerator proses pembangunan tersebut, baik kebijakan yang bersifat langsung dalam bidang ekonomi, maupun kebijakan yang bersifat tidak langsung dalam bidang lainnya seperti bidang pemerintahan dan politik. Salah satu upaya untuk mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan tersebut dalam bidang pemerintahan dan politik adalah kebijakan pembagian kewenangan penyelenggaraan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lazim disebut sebagai kebijakan sentralisasi dan/atau desentralisasi. Kebijakan sentralisasi lebih mengedepankan pendekatan efisiensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan ini lebih menekankan kepada peningkatan



kesejahteraan absolut. Sementara itu kebijakan desentralisasi lebih memprioritaskan dimensi keadilan atau kesejahteraan relatif (Baban Sobandi, 2004).

Dalam konteks ini, kebijakan desentralisasi bertujuan agar semua potensi yang dimiliki oleh daerah dapat bergerak dan dimanfaatkan menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan absolut dan kesejahteraan relatif dapat segera diwujudkan. Selain itu, pemerintah daerah melalui berbagai instrumennya harus mampu menggiring semua sumber daya yang ada menuju pola produksi, alokasi dan distribusi yang lebih baik, sehingga pada gilirannya daerah lebih mandiri dalam kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi (UNPAD, Laporan Hasil Penelitian, 2003).

Atas dasar hal tersebut, maka dari sudut pandang ekonomi, otonomi daerah harus benar-benar diarahkan pada optimalisasi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jika otonomi tidak dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, atau rendahnya komitmen serta kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi tersebut, bukannya akan menimbulkan efek positif dalam pemberdayaan ekonomi daerah, malah justru mengancam kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Beberapa sumber kebocoran ekonomi tatkala otonomi dilaksanakan tidak sungguh-sungguh atau kesiapan daerah dan pusat tidak “memadai”, dapat

diidentifikasi antara lain (Prud' Homme, 1995): *Pertama*, makin tingginya disparitas antar daerah. Hal ini didasarkan kepada anggapan bahwa potensi dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda, terutama dalam pemilikan sumber daya. Sementara itu, desentralisasi berarti memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurus aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Daerah bebas dalam mengolah sumber daya, menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal (memungut pajak, retribusi, dan melakukan belanja), serta dalam menentukan arah pembangunan ekonominya demi kesejahteraan rakyat dalam daerah yang bersangkutan. Walhasil, karena potensi dan kemampuan daerah berbeda-beda, maka disparitas antar daerah akan semakin tinggi. Daerah yang kaya dan memiliki struktur yang lebih seimbang akan melaju cepat, sementara itu Daerah yang miskin akan ketinggalan.

*Kedua*, inefisiensi produksi dan alokasi sebagai akibat desentralisasi murni disebabkan karena daerah akan memaksakan diri dalam melakukan produksi suatu komoditas tertentu meskipun secara ekonomis tidak terlalu menguntungkan. Selain itu, terdapat kemungkinan suatu komoditas hanya akan efisien jika diproduksi dalam skala besar (*economics of scale*), tetapi karena daerah memaksakan diri untuk memproduksinya, maka yang terjadi adalah banyaknya perusahaan sejenis dalam skala yang relatif kecil. Masih dalam konteks pemaksaan diri dalam memproduksi suatu komoditas, maka secara nasional dapat dinilai juga sebagai inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk komoditas lain,



karena motivasi kemandirian, akhirnya dialokasikan kepada komoditas tertentu yang kurang efisien.

*Ketiga*, instabilitas yang berpangkal dari luasnya kewenangan daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal. Dengan keluasan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tersebut, maka efektivitas kebijakan fiskal yang digulirkan oleh pemerintahan Pusat akan kurang. Dengan demikian apabila terjadi suatu guncangan dalam perekonomian, sulit bagi pemerintahan nasional untuk meredamnya, dan efek dari kebijakan fiskal bagi setiap daerah akan berbeda-beda.

Argumentasi di atas, nampaknya didukung oleh data-data Laporan Bank Dunia Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa: *“meskipun desentralisasi fiskal memberikan manfaat di beberapa negara seperti China, India, negara-negara Amerika Latin, serta negara-negara lain di belahan dunia ini, namun di sisi lain memunculkan 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu: meningkatnya ketidakadilan (kesenjangan), instabilitas makroekonomi, dan adanya resiko kewenangan lokal yang dapat menyebabkan kesalahan dalam alokasi sumber daya”* (World Development Report: The State in a Changing World, 1997).

Meskipun kondisi Indonesia tidak sama dengan negara-negara sebagaimana yang diteliti oleh Bank Dunia, namun hal tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk memacu kinerja kebijakan desentralisasi yang digulirkan Pemerintah Indonesia lebih baik. Artinya, hal-hal negatif yang muncul di beberapa negara

dalam konteks desentralisasi ini, terutama ketidaksiapan Pusat dan Daerah, harus mampu dieliminasi.

Ada beberapa indikator untuk melihat berhasil atau tidaknya kebijakan desentralisasi tersebut, sekaligus sebagai indikator tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan. Diantara indikator-indikator tersebut, indikator pada bidang ekonomi, sosial, sarana dan prasarana dasar, serta keuangan daerah, merupakan indikator yang sangat penting dan relevan untuk dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan dalam jangka pendek, dan terutama dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan desentralisasi yang direspon oleh daerah dengan tuntutan pemekaran wilayah.

1. Dalam bidang ekonomi, ketercapaian tujuan pembangunan antara lain dapat dilihat dari pendapatan nasional perkapita, pengurangan jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran. Makin tinggi tingkat pendapatan perkapita menunjukkan makin berhasil pembangunan yang dicapai. Sementara itu, makin sedikit jumlah penduduk miskin maka makin berhasil pembangunan tersebut. Dalam praktek perhitungan pendapatan perkapita di suatu daerah sering direpresentasikan oleh *Produk Domestik Regional Bruto perkapita*. Pendapatan regional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Sedangkan pendapatan regional perkapita adalah pendapatan regional dibagi jumlah penduduk.



Selanjutnya, masih indikator dalam bidang ekonomi, juga dapat dilihat dari tingkat pemerataan pendapatan. Dalam hal ini terdapat beberapa alat yang biasa digunakan untuk melihat indikator ini, antara lain gini ratio, luas daerah di bawah kurva lorenz, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan lain-lain. Dalam kajian, ini, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang paling representatif digunakan untuk melihat tingkat pemerataan ini. Makin banyak jumlah penduduk miskin berarti makin tidak berhasil pembangunan yang dilaksanakan, atau makin rendah kinerja pembangunan.

Indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi juga dapat dilihat secara sektoral. Dalam hal ini, sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah dapat dijadikan indikator operasional dengan melihat kontribusi nilai tambah sektor tersebut terhadap pendapatan daerah (PDRB). Bagi daerah yang didominasi sektor pertanian seperti Kabupaten Tasikmalaya, maka kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

2. Dalam Bidang Sosial, keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan dapat dilihat antara lain dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan dilihat dari indikator kinerja sektor pendidikan adalah adanya kesempatan bagi masyarakat usia didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak secara kualitas dan

kuantitas. Dari sisi kualitas, indikator ini secara operasional dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid. Rasio ini secara teoritis berkorelasi positif dengan daya serap murid terhadap materi ajaran yang diberikan. Artinya, makin tinggi rasio guru terhadap murid, maka makin baik daya serap murid terhadap materi yang diajarkan, sehingga makin tinggi kualitas pendidikan yang didapatkan.

Indikator kesehatan yang paling utama adalah pemerataan kesehatan bagi masyarakat. Indikator ini dapat dilihat dari rasio tenaga kesehatan terhadap seluruh penduduk. Makin tinggi rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk maka makin besar peluang masyarakat secara umum untuk mendapatkan layanan kesehatan yang makin baik.

3. Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Dasar, keberhasilan pembangunan dapat diukur dan dinilai dari ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang secara empirik dan teoritik mempunyai peran penting ini antara lain adalah sarana dan prasarana perhubungan serta sarana dan prasarana penerangan. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini didasari pemikiran, makin panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota dan desa juga makin tinggi.

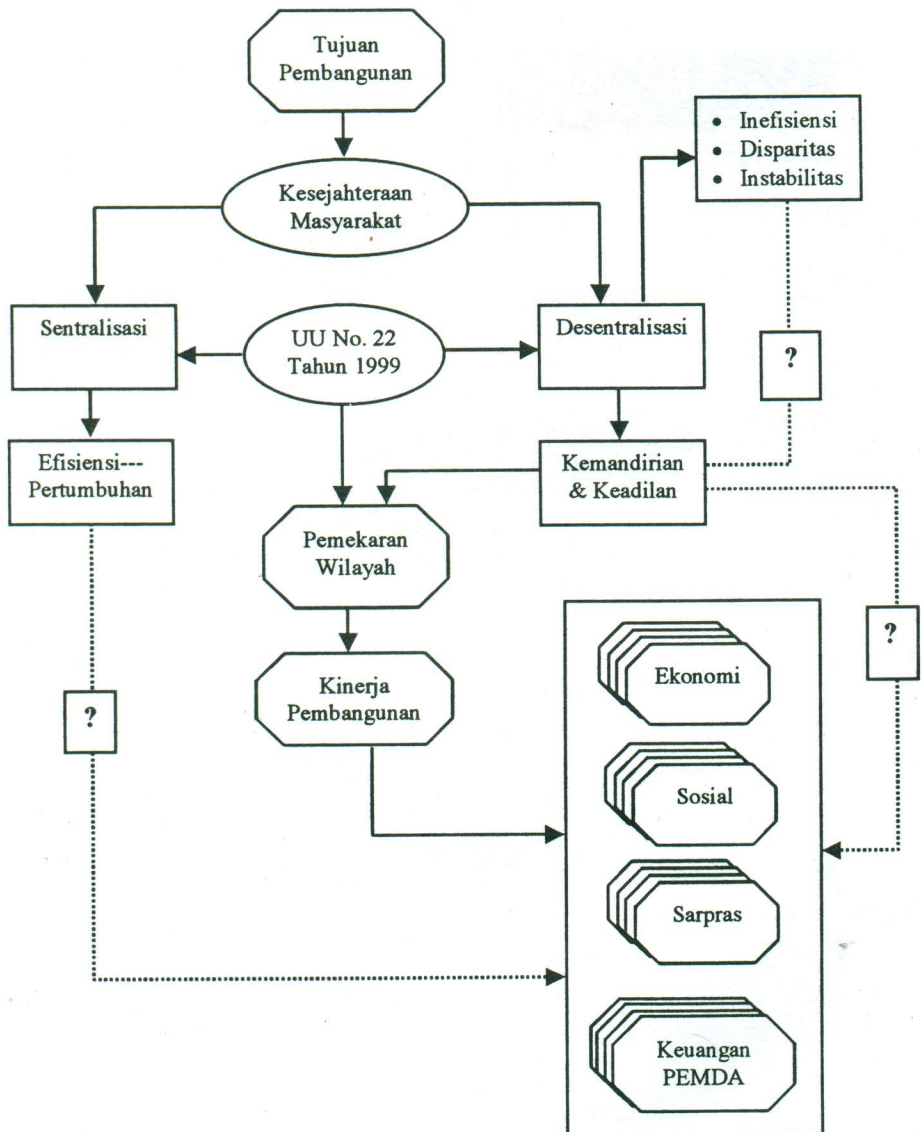


Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada Bidang Sarana dan Prasarana Dasar, sektor listrik merupakan sektor yang penting dan memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar hal tersebut, rasio jumlah pelanggan listrik terhadap keseluruhan rumah tangga dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

4. Keuangan daerah merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan pemekaran wilayah. Secara langsung pemekaran wilayah berimplikasi kepada pembagian sumber sumber keuangan. Dampak langsung dan sangat terasa oleh Pemerintah Daerah terutama adalah pada sisi penerimaan, khususnya Pendapatan Asli Daerah, karena PAD merupakan sumber pendapatan yang objek penerimaannya berada di daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain, pemekaran wilayah berarti pembagian sumber PAD antara daerah induk dengan daerah yang baru.

## F. Model Penelitian

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut, dapat dirumuskan model kerangka pikir penelitian dalam bentuk diagram alur sebagai berikut:





## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Artinya, bahwa penelitian ini hanya difokuskan pada satu kasus yaitu kasus pemekaran wilayah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi Kabupaten Tasikmalaya (daerah induk) dan Kota Tasikmalaya (daerah baru). Sementara itu, permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, dijawab melalui teknik dan prosedur mendeskripsikan berbagai data kuantitatif empirik yang periode pra pemekaran dan periode pasca pemekaran.

### 1. Variabel dan Indikator variabel

Variabel penelitian yang diukur dalam penelitian ini adalah “**Variabel Kinerja Pembangunan**”. Adapun indikator-indikatornya meliputi sebagai berikut:

- a. Indikator pada Bidang Ekonomi, dibagi ke dalam dua kategori yaitu indikator makro dan indikator sektor pertanian. Untuk indikator makroekonomi ditetapkan tingkat pengangguran dan gini ratio. Untuk indikator sektor pertanian ditetapkan kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB.
- b. Indikator pada Bidang Sosial meliputi indikator pada sektor pendidikan yaitu rasio guru terhadap murid dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan indikator pada sektor kesehatan yaitu rasio dokter terhadap penduduk.
- c. Indikator pada Bidang Sarana dan Prasarana dasar meliputi indikator pada sektor perhubungan yaitu panjang jalan dan indikator pada sektor

listrik yaitu rasio pelanggan listrik rumah tangga terhadap keseluruhan rumah tangga;

- d. Indikator pada Bidang Keuangan Daerah ditetapkan ratio nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap keseluruhan penerimaan daerah yang ada dalam APBD.

## Matriks 1

### Indikator Variabel “Kinerja Pembangunan”

Bidang	Sektor	Indikator
Ekonomi	Makro Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pengangguran</li> <li>• Gini Ratio</li> </ul>
	Pertanian	Kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB
Sosial	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Partisipasi Sekolah</li> <li>• Rasio guru terhadap murid</li> <li>• Angka Melek Huruf</li> </ul>
	Kesehatan	Rasio dokter terhadap penduduk
Sarana dan Prasarana	Listrik	Rasio pelanggan rumah tangga terhadap seluruh rumah tangga
	Perhubungan	Panjang jalan di kabupaten/kota
Keuangan Pemerintah Daerah		Pendapatan Asli Daerah

## 2. Periode Pengamatan

Sebagai mana disebutkan terdahulu bahwa kajian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kebijakan pemekaran wilayah terhadap kinerja pembangunan. Oleh karena itu maka periode pengamatan yang digunakan dalam kajian ini meliputi sebelum dan sesudah kebijakan tersebut, yaitu tahun 1997 sampai dengan 2002. Adapun data yang



disajikan untuk setiap indikator berbeda-beda disesuaikan dengan ketersediaan data, tanpa mengurangi kualitas evaluasi.

### **3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data**

Sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, maka teknik pengumpulan yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan menelaah data-data sekunder yang ada dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah Daerah. Dokumen resmi yang digunakan terutama adalah adalah:

- Tasikmalaya Dalam Angka beberapa edisi, yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Kabupaten Tasikmalaya;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawabab Bupati Tasikmalaya, beberapa tahun;
- Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tasikmalaya bekerjasama dengan instansi lain seperti Institut Teknologi Bandung;
- Dokumen lainnya.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data ddilakukan dengan teknik komparatif dan pertumbuhan. Teknik komparatif dimaksudkan untuk membandingkan indikator kinerja pembangunan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Sedangkan teknik pertumbuhan dilakukan untuk melihat pertumbuhan

dari beberapa indikator kinerja pembangunan selama periode pengamatan. Formulasi pertumbuhan yang digunakan sebagai berikut:

$$g = \sqrt{\frac{X(t)}{X(t-1)}} - 1$$

## H. Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latarbelakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, model penelitian dan sistematika penelitian;
- Bab II berisi tentang teori dan kebijakan pembangunan serta pemekaran wilayah. Dalam bab ini diuraikan mengenai teori, konsep, dan kebijakan yang terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan, teori pengukuran dan kinerja pembangunan, konsep-konsep indikator pembangunan, kebijakan desentralisasi dan pemekaran wilayah, serta *best practice* mengenai kebijakan serupa di negara-negara lain.
- Bab III menguraikan tentang pemekaran wilayah yang terjadi pada objek penelitian sendiri dalam hal ini Kabupaten Tasikmalaya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Bab ini memuat mengenai latarbelakang dilakukannya pemekaran wilayah hingga arah kebijakan Kabupaten Tasikmalaya pasca pemekaran wilayah;



- Bab IV berisi proses analisis kebijakan pemekaran wilayah. Dalam hal ini dilakukan analisis dan pengukuran variabel kinerja pembangunan yang telah dicapai sebelum dan sesudah pemekaran. Ada empat bidang yang dievaluasi yaitu Bidang Ekonomi, Sosial, Sarana dan Prasarana Dasar, dan Bidang Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun indikator-indikator dari setiap bidang tersebut ditetapkan yang berdasarkan pertimbangan mempunyai dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan bersifat dinamis dalam jangka pendek. Artinya, meskipun periode pengamatan pasca pemekaran tidak terlalu lama (hanya 2 tahun), namun, karena karakteristiknya yang dinamis, indikator-indikator tersebut dimungkinkan dapat berubah.
- Bab V berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan tidak lain dari kristalisasi dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Sementara itu rekomendasi dibagi ke dalam dua kategori yaitu rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

## BAB II

# TEORI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SERTA PEMEKARAN WILAYAH

### A. Kebijakan Pembangunan: *Antara Efisiensi, Keadilan, dan Kemandirian Daerah*

Di Indonesia, pembangunan Daerah didefinisikan sebagai semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk urusan rumah tangga daerah maupun yang tidak termasuk, yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang bersumber dari Pemerintah (APBD dan APBN) maupun yang bersumber dari masyarakat (Kunarjo, 1992: 132). Dalam hal ini kegiatan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat merupakan pelaksanaan asas dekonsentrasi, sedangkan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan (*medebewind*).

- Pembangunan Daerah juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah tersebut melalui berbagai cara dan pendekatan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Upaya-upaya tersebut lebih lanjut diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan. Spesifikasi dari setiap program adalah proyek-proyek



pembangunan. Dengan demikian, ujung tombak dari manajemen pembangunan di Daerah tidak lain adalah bagaimana mengelola proyek-proyek yang dilaksanakan di Daerah agar menghasilkan suatu output dan outcome atau kinerja yang optimal dengan sumber daya yang ada. Dalam kerangka ini, maka analisis manajemen pembangunan di Daerah terkonsentrasi pada manajemen proyek pembangunan yang dilaksanakan di Daerah.

Selanjutnya, kebijakan pembagian kewenangan penyelenggaraan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sejak lama menjadi perdebatan yang tak kunjung henti. Beberapa paka, ekonomi klasik misalnya cenderung lebih memihak kepada dominasi peran Pemerintah Pusat (Nasional) dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Mereka percaya, bahwa economies of scale akan lebih berpeluang tercapai jika perekonomian dikendalikan oleh pemerintah nasional dengan skala yang lebih besar.

Perkembangan akhir-akhir ini, menunjukkan munculnya pemihakan baru terhadap peningkatan peran serta pemerintah regional dalam perumusan kebijakan pembangunan di daerahnya. Dalam konteks ini, kelompok pertama lebih menekankan kepada aspek efisiensi, sementara kelompok kedua selain aspek efisiensi juga aspek distribusi menjadi pertimbangan lain. Tumbuhnya pemikiran kedua ini, ditandai dengan perkembangan yang meyakinkan dalam konsepsi ekonomi regional, serta berkembangnya pemikiran baru mengenai integrasi kebijakan ekonomi dengan politik, dalam mengakomodasi perkembangan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap

pelayanan, kemandirian, serta partisipasi pembangunan.. Dengan demikian, kajian mengenai desentralisasi dan otonomi Daerah, tidak lagi hanya menjadi konsepsi politik, tetapi juga kajian ekonomi (Baban Sobandi, 2004).

Pembangunan regional pada hakikatnya diadakan berdasarkan pada pemikiran bahwa region secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang secara integral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem nasional. Pembangunan yang dilakukan di region-region pada dasarnya adalah juga pembangunan nasional. Atas dasar pemikiran itu, muncul pendekatan pembangunan atas dasar sektor-sektor kegiatan tanpa memperhatikan lokasinya. Namun, dalam perkembangannya pendekatan tersebut dirasakan kurang lengkap, karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua region memiliki kondisi dan potensi yang sama, sehingga muncul permasalahan kesenjangan (inequity) dan inefisiensi dalam pembangunan.

Masih dalam tataran konsepsi pembangunan nasional, muncul pendekatan yang lebih memperhatikan kondisi dan potensi setiap region dalam suatu nation tertentu, yaitu pendekatan pembangunan regional. Pendekatan pembangunan regional, pada babak selanjutnya terus berkembang dan menjadi perhatian baik di kalangan praktisi maupun di kalangan akademisi. Yang semula banyak didasarkan atas pertimbangan ekonomi belaka, kemudian diintegrasikan dengan perkembangan masyarakat yang makin menuntut kualitas dan kuantitas pelayanan dari pemerintah serta tuntutan kemandirian dan partisipasi pembangunan. Kini, masalah kebijakan pembangunan regional, tidak lagi hanya dikaitkan dengan masalah efisiensi



dan pemerataan saja, melainkan pula dikaitkan dengan masalah pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan aspirasi masyarakat tersebut.

Kebijakan pembangunan, unit pemerintahan pada tingkat manapun yang mengimplementasikannya, secara ekonomis ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya income percapita. Dan peningkatan income percapita ini bisa dicapai apabila terjadi pertumbuhan dalam bidang ekonomi.

Ada dua alternatif kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang ketinggalan menurut Richardson (Baban Sobandi, 2000). Pertama, jika efisiensi nasional merupakan tujuan utama yang harus dicapai, maka kebijakan mendorong migrasi tenaga kerja inter regional lebih baik dari pada mendorong relokasi industri. Tetapi jika pemuasan preferensi-preferensi lokasional merupakan prioritas yang lebih tinggi, maka usaha untuk mendorong perpindahan modal harus lebih ditekankan. Kedua, metode "tenaga kerja keluar pekerjaan masuk" (labour out jobs in) dapat dilakukan jika yang merupakan permasalahan regional adalah ketidak-seimbangan pasar tenaga kerja lokal dan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan pengangguran regional.

Sementara itu, Clark & Petters (dalam Richardson, dalam Baban Sobandi, 2000) berpendapat bahwa operasi kekuatan pasar memberikan pemecahan yang lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Menurut pendapat ini,

pengaturan buatan manusia tidak luwes dalam menghilangkan perbedaan-perbedaan spasial dalam hal biaya, harga, dan pendapatan, yang sering kali timbul setiap saat sebagai akibat dari interdependensi umum dalam perekonomian ruang. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan tersebar diantara sejumlah individu perusahaan, dan bukannya disentralisasikan, maka kesalahan-kesalahan peramalan akan cenderung saling meniadakan.

Richardson mengkritik pandangan ini. Menurutnya, teori keseimbangan umum yang melandasinya cenderung bersifat statik, sedangkan proses regional bersifat dinamik. Menurut Richardson, argumentasi yang mengasumsikan persaingan sempurna dan marginalisme, tidak satu pun diantaranya yang relevan dengan perekonomian ruang. Oligopoli dan monopoli adalah bentuk-bentuk pasar spasial yang lebih lazim. Sedangkan perubahan-perubahan lokasional biasanya adalah merupakan suatu lompatan besar atau sama sekali tidak ada perpindahan, dan bukannya suatu perpindahan marginal. Keputusan-keputusan lokasi mungkin juga dilandaskan pada irrasionalitas dan diambil dengan mengabaikan pengetahuan yang relevan.

Penolakan terhadap mekanisme pasar dapat juga disebabkan karena divergensi biaya dan manfaat sosial (*social cost and benefit*), seperti biaya-biaya kongesti sosial di pusat-pusat aglomerasi. Dalam beberapa hal, mekanisme pasar menimbulkan pemborosan sumber daya, misalnya mekanisme pasar tidak mampu mewujudkan keuntungan-keuntungan potensial dari investasi dalam migrasi atau mempekerjakan pekerja-pekerja yang kehilangan

pekerjaan di daerah mereka sendiri dan yang tidak mampu pindah ke daerah-daerah lain. Akhirnya, secara politik, konsep *laissez faire* mungkin tidak dapat diterima, jika ia melanggengkan kepincangan-kepincangan regional dalam hal pendapatan dan kesempatan kerja.

## **B. Desentralisasi, Pemekaran Wilayah, dan Kinerja Pembangunan**

Bagi masyarakat di daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, jelas merupakan prospek yang menjanjikan adanya perubahan dan perbaikan kinerja kebijakannya termasuk kinerja kebijakan ekonomi makronya. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa Pemerintah Daerah sekarang ini telah diberikan keleluasaan dalam perumusan dan penetapan kebijakan daerah, dan untuk melaksanakan kebijakan tersebut telah dialokasikan dana perimbangan dari kas negara.

Otonomi Daerah dalam bidang fiskal sebagaimana tertuang dalam kedua undang-undang tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada dasarnya merupakan instrumen yang paling memungkinkan bagi daerah, terutama Daerah Kabupaten/Kota, untuk mampu berperan dalam memberdayakan ekonomi daerahnya. Akan tetapi kebijakan tersebut bukan tidak ada bahayanya, terutama jika implementasi kebijakan tersebut tidak dilengkapi dengan instrumen pengendalian yang memadai oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah Daerah Propinsi sebagai wakil



pemerintah pusat. Pengeluaran (*expenditure* atau *spending*) pemerintah daerah yang tidak terkendali yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan ataupun pinjaman daerah (Dalam Negeri maupun Luar Negeri) sehingga mengakibatkan defisit yang berlebihan; akan berdampak kepada kondisi stabilitas makro ekonomi.

Mengingat hal itu, desentralisasi dalam bidang keuangan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu saja harus disertai dengan akuntabilitas Pemerintah Daerah, baik kepada Pemerintah Pusat maupun kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Bentuk akuntabilitas yang harus menjadi komitmen Pemerintah Daerah bukan semata-mata ditinjau dari berapa banyak program dan jangkauan program yang dapat dilaksanakan. Akuntabilitas kinerja tersebut harus dapat diukur terutama dari kemanfaatannya yang dapat dirasakan oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, antara lain adalah tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat daerah.

Dalam pengertian ini, pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sedemikian rupa dengan berbagai program pembangunan yang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di daerah. Pembiayaan pembangunan harus betul-betul diarahkan kepada sektor-sektor yang secara langsung mampu mendorong terciptanya kegiatan produktif masyarakat, penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta penciptaan lapangan pekerjaan yang baru; dengan tetap memperhatikan sektor-sektor lainnya yang secara langsung dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sumber-sumber produksi dan sebagainya.

Kita sadari bahwa dalam kondisi dewasa ini, perekonomian daerah yang pada umumnya masih mengandalkan kepada sektor pertanian dirasakan sudah kurang mampu menghasilkan tingkat produktivitas ekonomi yang tinggi. Kondisi ini berbeda dengan struktur perekonomian nasional yang telah cenderung di dominasi oleh produktivitas sektor sekunder, yaitu sektor perindustrian bersama-sama sektor jasa-jasa. Memang, dalam periode krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997/98 yang lalu, perekonomian daerah cenderung survive justru karena sektor pertanian tidak terkena dampaknya.

Akan tetapi dalam kondisi normal hal itu tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi yang hanya didominasi oleh sektor primer, pada akhirnya cenderung akan tertinggal dan terus merosot. Akibatnya, kondisi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat juga akan semakin merosot pula, karena daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Akibat lanjutannya, Pemerintah Daerah juga akan menemukan kesulitan dalam menarik dana dari masyarakat melalui sistem perpajakan daerah. Jika ini yang terjadi, maka perekonomian daerah kembali akan sangat bergantung kepada kekuatan-kekuatan ekonomi eksternal, baik yang berasal dari daerah lain yang bertetangga, bantuan-bantuan pemerintah atau propinsi, bahkan kekuatan perekonomian global yang masuk ke daerah yang bersangkutan.

Dengan semakin luasnya otonomi daerah yang dapat diselenggarakan di daerah, maka Pemerintah Daerah harus memiliki inisiatif dan kreativitas yang

lebih baik lagi dalam memberikan insentif bagi pertumbuhan kemandirian ekonomi daerah. Namun demikian, hendaknya pemerintah Daerah tidak terjebak kepada opsi kebijakan yang cenderung terlalu bersifat redistributif, dengan mengobral subsidi ataupun bantuan-bantuan sosial ekonomi yang tidak mendidik masyarakat untuk produktif dan memiliki daya saing. Sebaliknya, masyarakat juga sebaiknya jangan selalu mengharapkan bahwa Pemerintah Daerah akan datang memberikan paket-paket bantuan seperti itu, karena pada kenyataannya kemampuan daerah sangat terbatas. Jika kita perhatikan, kontribusi pengeluaran pemerintah Daerah dalam PDRB secara umum hanyalah berkisar antara 10% hingga 20% dari total PDRB daerah. Ini berarti peranan ekonomi pemerintah sendiri dalam perekonomian daerah adalah relatif rendah. Namun yang terpenting adalah seberapa jauh program-program pembelanjaan anggaran daerah dapat memberikan efek penggandaan (*Multiplier Effect*) yang cukup signifikan bagi terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat.

Oleh karena itu strategi dasar yang dapat ditempuh oleh pemerintah Daerah sejalan dengan kebijakan otonomi yang berlaku, tampaknya adalah menciptakan efisiensi ekonomis dan efektivitas program-program pembelanjaan daerah.

Dalam pembebanan kewenangan dan tanggung jawab pada berbagai tingkatan pemerintahan, Bryant dan White (1989) menyarankan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, suatu proyek atau program hendaknya diserahkan pada organisasi apapun yang memiliki “insentif” untuk melaksanakannya. *Kedua*,



“lingkungan politis” suatu organisasi harus menunjang pelaksanaan proyek atau program tersebut. *Ketiga*, bahwasannya kebanyakan proyek melibatkan beberapa organisasi, sehingga hubungan antar organisasi dan cara-cara organisasi berinteraksi menjadi penting untuk diperhatikan. *Keempat*, harus dibuat pilihan-pilihan dengan mempertimbangkan bukan hanya kapasitas yang telah dimiliki organisasi, melainkan juga sehubungan dengan pengembangan kemampuan kelembagaan organisasi-organisasi di daerah itu sendiri.

Cara lain untuk mempertimbangkan kapan suatu aktivitas pembangunan dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat nasional dan kapan dilakukan oleh pemerintahan regional tergantung kepada tiga hal yaitu: *Pertama*, banyaknya informasi yang diperlukan. Sejauh bahwa kebijakan itu didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang baik serta pada kepastian tentang prosedur serta hasil akhir, maka dapat dijalankan pengarahannya dan kontrol sentral yang lebih besar. Tetapi kalau suatu kebijakan dioperasikan dalam konteks yang tidak menyediakan informasi yang cukup lengkap, preferensi dan kebutuhan-kebutuhan konsumennya kurang jelas, dan tugas-tugas administrasinya kabur, maka sebaiknya dilaksanakan di tingkat regional.

*Kedua*, cara pemasokan komoditas yang diperlukan oleh masyarakat konsumen. Ada barang-barang yang harus diproduksi pada skala besar dan memerlukan modal yang besar (*capital intensive*), namun ada pula barang atau jasa yang pemasokannya melibatkan kontak antar individu, misalnya pelayanan kesehatan. Untuk komoditas jenis pertama lebih baik dilakukan atau dipasok pada tingkat nasional. Sementara itu, untuk jenis yang kedua

lebih baik dipasok pada tingkat regional atau lokal, karena lebih sulit dipantau, bervariasi sesuai dengan lokasinya, dan sangat bergantung kepada pandangan masyarakat. Semakin banyak kontak tatap muka yang dituntut, akan makin sukarlah mengelola suatu organisasi besar karena kesulitan mengawasi mutu hubungan antar pribadi dan sukarnya mengukur hasil.

*Ketiga*, peraturan dan daya tanggap. Peraturan dan pengaturan berarti memberlakukan standar-standar yang adil. Dan keadilan sering tercapai dengan baik bila pengaturan ditangani di tingkat nasional. Namun, bila daya tanggap menjadi perhatian utama, mungkin bermanfaat jika dilakukan desentralisasi tugas-tugas, sehingga petugas-petugas lokal dapat menyesuaikan programnya dengan kondisi-kondisi lokal.

Sementara itu Leftwich, et.all (1980) menyatakan bahwa penentuan pihak yang berwenang atas pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada pertimbangan *net benefit* yang paling maksimal yang dapat diperoleh dari pembangunan tersebut, yaitu pada saat *marginal benefit* sama dengan *marginal cost* dari pengeluaran untuk barang atau jasa publik yang harus disediakan. Prasyarat ini dikenal dengan *equimarginal principle*. Pengeluaran pemerintah harus meningkat ketika manfaat dari rupiah terakhir yang dikeluarkan lebih besar dari biayanya. Sementara itu, pengeluaran pemerintah harus dikurangi ketika manfaat yang didapatkan dari rupiah terakhir yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan biayanya. Tingkatan pemerintahan yang mempunyai *equimarginal level* yang lebih

rendahlah yang semestinya berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan suatu jenis barang atau jasa publik.

Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut, maka dari sudut pandang ekonomi, otonomi daerah harus benar-benar diarahkan pada optimalisasi net benefit yang akan diterima oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

### *C. Ukuran Wilayah dan Demokratisasi: Kebijakan dan Pengalaman Negara Lain*

Salah satu paradigma pokok yang dianut oleh UU Pemerintahan Daerah yang baru adalah mendorong proses demokratisasi di tingkat akar rumput. Pada saat yang bersamaan, era otonomi dewasa ini diitandai oleh lahirnya banyak sekali unit-unit pemerintahan baru mulai level propinsi, kabupaten / kota, sampai dengan kecamatan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa pembentukan wilayah (khususnya di tingkat kabupaten / kota) memiliki korelasi positif dengan peningkatan kehidupan demokrasi masyarakat lokal.

Asumsi ini sangatlah logis, sebab ketika terjadi pemekaran wilayah (baca: penambahan unit pemerintahan) maka jangkauan teritorial secara otomatis menjadi semakin pendek / dekat, sementara jumlah penduduk yang harus dilayanipun menjadi semakin sedikit. Dengan demikian, unit pemerintahan tadi semestinya lebih mampu memberikan pelayanan secara prima, sedangkan



masyarakat memiliki akses yang lebih mudah / cepat terhadap proses pengambilan keputusan baik politis maupun administratif di daerahnya.

Meskipun demikian, patut disadari bahwa logika diatas tidak selamanya bersifat linier. Artinya, asumsi bahwa “semakin banyak pemekaran wilayah dan semakin besar jumlah unit pemerintahan, maka semakin baik kehidupan demokrasi”, tidaklah berlaku secara mutlak. Hingga taraf tertentu, pembentukan daerah (otonom) baru yang kurang terkendali justru akan menghasilkan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan, disamping terhambatnya proses demokratisasi itu sendiri. Dalam rangka mencari proporsi yang ideal antara ukuran wilayah dengan kadar demokrasi itulah, tulisan ini dibuat.

Di Indonesia, pasca UU Nomor 22 Tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang begitu signifikan, sehingga jumlah daerah propinsi maupun kabupaten/kota mengalami peningkatan. Berikut, gambaran tentang jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia

**Tabel 2.1**

**Nama Propinsi Dan Jumlah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia**  
(KEADAAN BULAN FEBRUARI 2001)

Propinsi	Jumlah Kota	Jumlah Kab.	Total
Daista Aceh	2	11	13
Sumatera Utara	6	13	19
Sumatera Barat	6	9	15
Riau	3	12	15
Jambi	1	9	10
Sumatera Selatan	1	6	7
Bengkulu	1	3	4
Lampung	2	8	10
Dki Jakarta	5	-	5
Jawa Barat	6	16	22
Jawa Tengah	6	29	35
Daista Yogyakarta	1	4	5
Jawa Timur	8	29	37
Kalimantan Barat	1	8	9
Kalimantan Tengah	1	5	6
Kalimantan Timur	4	8	12
Kalimantan Selatan	2	9	11
Bali	1	8	9
Nusa Tenggara Barat	1	6	7
Nusa Tenggara Timur	1	13	14
Sulawesi Selatan	2	22	24
Sulawesi Tengah	1	7	8
Sulawesi Utara	2	3	5
Sulawesi Tenggara	1	4	5
Maluku	1	4	5
Maluku Utara	1	2	3
Irian Jaya Timur	1	4	5
Irian Jaya Tengah	-	5	5
Irian Jaya Barat	1	3	4
Banten	2	4	6
Bangka Belitung	1	2	3
Gorontalo	1	2	3
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>268</b>	<b>341</b>

Sumber: [http://www.gtzsfdm.or.id/documents/library/on\\_ind/Najum\\_Propinsi\\_Kab\\_Kota.pdf](http://www.gtzsfdm.or.id/documents/library/on_ind/Najum_Propinsi_Kab_Kota.pdf)

Sementara itu, dasar hukum yang berupa undang-undang dan rancangan undang-undang pembentukan daerah otonom baru tersebut adalah sebagai berikut:

**Tahun 1999:**

1. Undang-Undang 9/1999: Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
2. Undang-Undang 10/1999: Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
3. Undang-Undang 11/1999: Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
4. Undang-Undang 12/1999: Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
5. Undang-Undang 13/1999: Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
6. Undang-Undang 14/1999: Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
7. Undang-Undang 15/1999: Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
8. Undang-Undang 16/1999: Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
9. Undang-Undang 45/1999: Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
10. Undang-Undang 46/1999: Pembentukan Propinsi Maluku Utara,



Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

11. Undang-Undang 47/1999: Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang
12. Undang-Undang 48/1999: Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue
13. Undang-Undang 49/1999: Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
14. Undang-Undang 50/1999: Pembentukan Kabupaten Boalemo
15. Undang-Undang 51/1999: Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan
16. Undang-Undang 52/1999: Pembentukan Kabupaten Lembata
17. Undang-Undang 53/1999: Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
18. Undang-Undang 54/1999: Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
19. Undang-Undang 55/1999: Pembentukan Kabupaten Landak

#### **Tahun 2001:**

1. UU No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. UU No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. UU No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan;
4. UU No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang;

5. UU No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
6. UU No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau;
7. UU No. 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam;
8. UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cimahi;
9. UU No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
10. UU No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Kota Batu
11. UU No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang
12. UU No. 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau;

**Tahun 2002:**

1. UU No. 13/2002 Tentang Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. UU No. 12/2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
3. UU No. 11/2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan
4. UU No. 10/2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
5. UU No. 9/2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. UU No. 8/2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
7. UU No. 7/2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
8. UU No. 6/2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi

## Sumatera Selatan

9. UU No. 5/2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
10. UU No. 4/2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

## Tahun 2003: (Sudah disetujui DPR)

1. RUU pembentukan Kabupaten Kolaka Utara, Bombana, dan Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. RUU pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. RUU pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Riau.
4. RUU pembentukan Kabupaten Tojo Una Una di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. RUU pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara.
6. RUU pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.
7. RUU pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua.
8. RUU pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.



9. RUU pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU Selatan, dan Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
10. RUU pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat.
11. RUU pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
12. RUU pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku.
13. RUU pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan disetujuinya pembentukan Kabupaten baru pada tahun 2003, berarti sejak tahun 1999 sampai saat ini secara yuridis telah terbentuk 110 kabupaten/kota. Jumlah itu hampir setara dengan sepertiga jumlah kabupaten/kota yang ada di era Orde Baru, yang berjumlah 324 kabupaten/kota. Dengan kata lain, sampai akhir tahun 2003, jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia adalah 434.

Dalam artikel berjudul *Size and Democracy: Case for Decentralization*, Larry Diamond dan Svetlana Tsalik (dalam Triwidodo, 2002) memberi ilustrasi menarik tentang keterkaitan antara variable ukuran negara / wilayah dengan demokrasi. Menurut mereka, pada tahun 1998 hampir 75% negara yang berpenduduk dibawah 1 juta jiwa merupakan negara demokratis, sementara kurang dari 60% negara dengan populasi diatas 1 juta jiwa diikategorikan sebagai demokratis. Lebih ekstrim lagi, 5 dari 6 negara yang berpenduduk

dibawah setengah juta cacah (*microstate*) adalah demokratis, dan lebih dari tiga perempatnya menerapkan demokrasi liberal. Dengan kata lain, jika kita menginginkan suatu negara atau daerah tetap demokratis, maka harus diupayakan agar jumlah penduduk tidak berkembang secara dramatis.

Permasalahannya, hampir tidak ada satupun negara atau daerah yang tidak mengalami pertumbuhan penduduk. Dalam hal demikian, terdapat dua opsi yang bisa dipilih, yaitu dengan *pemekaran* (membagi satu wilayah menjadi dua atau lebih wilayah baru) atau *devolusi kekuasaan* (baik dengan sistem federalisme maupun otonomi luas). Dalam negara yang diklasifikasikan sebagai *microstate*, baik pemekaran maupun devolusi / desentralisasi tidaklah diperlukan karena negara tersebut sudah sangat kecil. Namun untuk negara besar seperti Indonesia, kedua opsi tadi menjadi pilihan kebijakan yang sangat populer. Dengan pola pikir seperti ini tidaklah aneh jika kemudian muncul banyak aspirasi untuk membentuk daerah baru yang alasan pembenarnya adalah mempercepat proses demokrasi lokal.

Menyimak pengalaman negara lain, jumlah daerah otonom juga jauh lebih banyak dibanding kondisi Indonesia. Sebagai contoh, Jepang memiliki 47 propinsi (*prefecture*) dan 3.232 daerah otonom setingkat kabupaten / kota (*ShiChoSon*). Sementara di Thailand terdapat 75 propinsi dengan 1.130 daerah otonom setingkat kabupaten / kota. Padahal, secara geografis kedua negara tadi jauh lebih kecil dibanding Indonesia, namun memiliki unit pemerintah daerah yang jauh lebih besar. Atas dasar ini, gagasan pemekaran wilayah, sekali lagi, menemukan dasar argumen yang sangat kuat.

Walaupun dapat diterima secara logis maupun teoretis, namun beberapa hal perlu dipertimbangkan secara matang sebelum diambil keputusan politik tentang pemekaran wilayah. Triwidodo Wahyu Utomo (Media Indonesia, 16 Desember 2002) mengidentifikasi 3 faktor yang harus dipertimbangkan yaitu: *Pertama*, pengertian “ukuran wilayah” untuk konteks Indonesia tidak hanya menyangkut jumlah penduduk, tetapi juga luas geografis serta kemampuan daerah khususnya dibidang keuangan.

Apabila ukuran populasi saja yang digunakan, maka hanya wilayah Jawa yang “berhak” dimekarkan karena faktor konsentrasi penduduk. Hasilnya, bisa jadi pulau Jawa akan terbagi dalam ribuan daerah mini yang otonom. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika ukuran luas geografis saja yang dipakai. Sedangkan dalam ukuran kemampuan finansial, berlaku premis bahwa makin rendah / kecil kemampuan suatu daerah makin tinggi urgensi penggabungan dengan daerah lain, dan bukan sebaliknya.

*Kedua*, pemekaran wilayah akan membuat rentang kendali birokrasi menjadi semakin panjang, sehingga mempersulit mekanisme koordinasi, pengawasan dan pembinaan oleh pusat terhadap propinsi dan kabupaten / kota, serta oleh propinsi terhadap kabupaten / kota. Konsekuensinya, fungsi dan tugas pemda dikhawatirkan akan menurun, jika tidak dikatakan inefektif dan inefisien.

*Ketiga*, pemekaran wilayah akan berimplikasi langsung terhadap berkurangnya jumlah dan kemampuan anggaran baik bagi daerah baru hasil pemekaran maupun daerah induknya. Lahirnya banyak daerah baru dewasa ini



menyajikan fakta bahwa anggaran daerah lebih banyak terserap untuk membiayai belanja rutin seperti gaji pegawai, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, pengadaan ATK, dsb. Akibatnya, sektor pembangunan menjadi terabaikan, dan pada saat bersamaan, kualitas pelayanan umum menurun secara drastis.

Dampak lainnya, pemda seolah-olah berlomba untuk mendongkrak PAD-nya dengan cara menetapkan berbagai macam pungutan baru yang jelas-jelas membebani masyarakat dan menjadikan iklim usaha kurang kondusif. Dalam keadaan masyarakat yang terbebani dan pemda yang lebih berorientasi kedalam ini, jelas sekali bahwa upaya demokratisasi merupakan hal yang hampir mustahil.

Itulah sebabnya, trend pemekaran wilayah tidak disukai lagi di negara-negara lain. Sebaliknya, di Jepang misalnya, 47 propinsi yang ada saat ini secara administratif dikelompokkan menjadi 12 wilayah saja. Sedang pada level kedua, amalgamasi juga dilakukan dengan target pengurangan *municipalities* dari 3.232 menjadi hanya 257 (Masahisa Hayashi, 2002).

Sementara itu, pemerintah Thailand sedang merancang kebijakan untuk menciutkan jumlah daerah otonom tingkat III yang disebut TAO (Tambol Administratif Organization, di Indonesia setingkat Kecamatan) dari 7.498 menjadi hanya 5.000 (*Bangkok Post*, 3/11/02). Pengalaman negara-negara Eropa-pun menunjukkan makin sedikitnya jumlah daerah otonom setingkat kabupaten / kota. Di Swedia, unit pemda berkurang dari 1.006 pada tahun

1960-an menjadi 284 pada tahun 1980-an. Sementara pada periode yang sama, jumlah unit pemda di Belgia berkurang dari 2.663 menjadi 589; di Denmark dari 1.387 menjadi 275; di Jerman dari 24.282 menjadi 8.426; di Inggris dari 1.288 menjadi 457 (Hubert Allen, 1990).

Bercermin kepada pengalaman negara-negara diatas, pemekaran wilayah di Indonesia perlu dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan berbagai untung ruginya. Jangan sampai di kemudian hari kita disibukkan dengan upaya untuk merampingkan atau menggabungkan kembali struktur dan jumlah pemerintah daerah. Demokrasi memang penting, namun pemekaran wilayah bukanlah cara satu-satunya untuk mempromosikannya. Buktinya, tidak terjadi distorsi nilai-nilai demokrasi ketika negara-negara tersebut melakukan pengurangan jumlah pemerintah daerah.

# **BAB III**

## **PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN**

### **TASIKMALAYA BERDASARKAN HASIL KAJIAN**

#### **SEBELUMNYA**

#### **A. Latarbelakang Pemekaran**

Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai pengganti Undang – undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di daerah dan Undang – undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi saat ini. Penetapan Undang – undang ini dianggap lebih mampu menjabarkan makna yang terkandung dalam Undang – Undang Dasar 1945 terutama dalam pasal 18 tentang pembagian daerah di Indonesia. Dalam Undang – undang ini penekanan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab lebih tegas dinyatakan dalam Undang – Undang No. 5 tahun 1974.

Sesuai Bab II Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom “. Berbeda dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 yang mengenal adanya Wilayah Kota Administratif maka dalam Undang – Undang



No. 22 Tahun 1999 ini Wilayah Kota Administratif ditiadakan. Lebih jelasnya tercantum pada pasal 125 ayat (2) yaitu “Selambat-lambatnya 2 tahun setelah tanggal ditetapkannya Undang – Undang ini Kotamadya, Kabupaten dan Kota Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Undang – undang ini sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan atas penetapan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999, Kota Administratif Tasikmalaya sangat membutuhkan pengkajian yang cermat untuk menentukan masa depan kelangsungannya. Hal ini sejalan dengan SK Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 1990 tentang Pola Induk Pengembangan Jangka Panjang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Gubernur Jawa Barat No. 1 Tahun 1994 tentang Pemantapan Kebijakan Dalam Penataan Kembali Wilayah Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Tingkat II di Jawa Barat.

Selain itu, pengajuan peningkatan status Kota Administratif Tasikmalaya menjadi Kota Tasikmalaya telah melewati beberapa tahapan dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Propinsi melalui beberapa keputusan sbb :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tanggal 19 April 2000 Tentang Persetujuan Penataan Kabupaten Tasikmalaya.
2. Surat Bupati Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 135.1/1032/Tapem Tanggal 1 Mei 2000 Perihal Usul Penataan

Kabupaten Tasikmalaya menjadi Dua Daerah Otonom, yaitu Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 135.1/Kep.DPRD-31/2000 Tanggal 22 Juni 2000 Tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tasikmalaya.
4. Surat Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135.1/1918/Otda Tanggal 10 Juli 2000 Perihal Usul Peningkatan Status Kota Administratif Tasikmalaya menjadi Daerah Kota.

Secara Sosiologis keadaan masyarakat Kota Administratif Tasikmalaya pada umumnya telah menunjukkan cirri – cirri masyarakat kota, dengan berbagai permasalahan yang kompleks, berimplikasi pada tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan prima dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Pelayanan Publik yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik apabila Pemerintah daerah masih mempunyai kewajiban melakukan pelayanan publik bagi daerah urban dan rural.

Untuk memperjuangkan rencana pemekaran Kabupaten Tasikmalaya yang telah diusulkan menjadi dua daerah otonom yakni terbentuknya pemerintahan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten yang baru, dipandang perlu untuk menyusun sebuah buku yang berisi penjelasan mengenai kondisi factual dan actual Kabupaten Tasikmalaya, analisis penentuan batas Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, serta analisis potensi daerah kota dan kabupaten paska pembentukan kota.

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang, sejak dibentuknya pemerintahan Kota Administratif Tasikmalaya pada tahun 1975, atau lebih kurang 25 tahun sampai dengan saat ini, Kota Tasikmalaya telah 3 kali melakukan penyusunan rencana tata ruang.

*Tahun 1983*, Penyusunan Rencana Induk Kota Tasikmalaya, dengan luas wilayah fungsional  $\pm 1.912,5$  ha, mencakup 3 kecamatan, yaitu : Kecamatan Cihideung, Tawang dan Cipedes (Perda No. 22 Tahun 1983 Tentang Rencana Induk Kota Tasikmalaya)

*Tahun 1983*, Penyusunan Evaluasi Rencana Induk Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah Fungsional kota  $\pm 5.553$  ha, mencakup Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes di tambah 15 desa, masing – masing 5 desa dari Kecamatan Undihiang, Kawalu dan Cibeureum (Perda No. 4 Tahun 1994 Tentang Evaluasi Rencana Induk Kota Tasikmalaya).

*Tahun 1986*, Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pengembangan Kota Tasikmalaya, dengan luas wilayah fungsional kota + 17.156,20 ha mencakup Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes, Kawalu, Cibeureum dan Kecamatan Indihiang (tidak termasuk Kemantren Sukaratu), dan telah mendapat legalitas formal dalam bentuk perda yaitu Perda Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Wilayah Pengembangan Kota Tasikmalaya.

Dari hasil kajian kondisi fisik dasar, analisis kebutuhan ruang untuk daerah perkotaan dan hasil penyusunan rencana tata ruang maka dapat disimpulkan



bahwa luas wilayah fungsional kota telah sejalan dengan usulan rencana pembentukan Daerah Kota Tasikmalaya yaitu  $\pm 17.156,20$  ha mencakup 6 (enam) Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes, Cibeureum dan Kecamatan Indihiang (termasuk Kecamatan Mangkubumi dan Tamansari hasil pemekaran dari Kecamatan Kawalu dan Cibeureum).

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan landasan untuk penyusunan kebijaksanaan pengembangan Kabupaten Tasikmalaya menjadi dua daerah otonom yaitu :

*Pertama*, Kota Tasikmalaya telah merupakan kota yang cukup kompleks dan terus berkembang, baik ditinjau Kabupaten Tasikmalaya maupun dalam lingkup Jawa Barat. Masalah – masalah perkotaan yang berkembang di Kota Tasikmalaya telah memerlukan penanganan yang cepat, tepat dan sesuai dengan dinamika masyarakat kota.

*Kedua*, perkembangan masalah – masalah perkotaan yang ada di Kota Tasikmalaya dewasa ini, yang juga dipacu oleh keberadaan UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 menyebabkan status pemerintahan kota sebagai kota administratif tidak mampu memenuhi kebutuhan lagi. Sesuai dengan UU tersebut bentuk pemerintahan kota di Indonesia saat ini hanya memberi satu alternatif bagi pengembangan pemerintahan daerah kota Tasikmalaya, yaitu peningkatan status pemerintahan Administratif Tasikmalaya menjadi Kota Tasikmalaya.

Tingkat perkembangan Kota Tasikmalaya merupakan yang termaju dan tertinggi ditinjau dari aspek ekonomi dan social, serta aspek jasa dan pelayanan dibandingkan dengan pusat – pusat pertumbuhan lainnya di Kabupaten Tasikmalaya. Kecenderungan pergerakan dan dinamika masyarakat dalam banyak hal telah dipengaruhi dan mengarah ke Kota Tasikmalaya, sehingga berpeluang besar menciptakan ketimpangan yang mencolok khususnya dalam aspek ekonomi-sosial, cakupan pelayanan dan jasa serta pembangunan. Untuk itu sudah sewajarnya Kota Administratif Tasikmalaya disamping ditingkat kabupaten statusnya menjadi Kota Tasikmalaya juga didukung dengan pengembangan di wilayah Administratif dan kewenangan, untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang. Sejalan dengan pembentukan Kota Tasikmalaya, juga dibentuk pusat pertumbuhan yang menjadi Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang baru, sehingga cakupan pelayanan kepada masyarakat di daerah luar kota dapat lebih baik dan cepat, demikian pula dapat mengantisipasi arus pergerakan yang terlalu mengarah ke kota.

*Ketiga*, perhitungan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berasal dari Wilayah Kota Administratif Tasikmalaya memperlihatkan bahwa PAD wilayah calon Kota Tasikmalaya relatif seimbang dengan PAD Kabupaten yang baru, Walaupun belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembayaran kegiatan pemerintahan daerah yang optimal, akan tetapi memperlihatkan peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Dan karena PAD ini bukan satu – satunya sumber keuangan daerah, maka dari sudut keuangan, baik kota maupun Kabupaten Tasikmalaya optimis dapat

membiayai kebutuhan untuk pembiayaan pemerintahan yang minimal sebagai daerah otonom dari sumber pendapatan asli daerahnya sendiri.

*Keempat*, penelaahan terhadap potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan wilayah/daerah Kabupaten Tasikmalaya setelah dikurangi dengan wilayah/daerah kota Tasikmalaya (pengembangan model) memperlihatkan bahwa kedua daerah ini akan mampu berdiri sebagai daerah otonom (tingkat II) dan serta dengan daerah otonom lainnya di Jawa Barat, walaupun dalam massa awal perkembangannya memerlukan subsidi yang diperkirakan 3 sampai 5 tahun mendatang.

## **B. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Pasca Pemekaran**

Tinjauan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini akan menitikberatkan pada kebijakan pengembangan wilayah. Kebijakan Pengembangan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan adanya 6 (enam) perwilayahan dalam pembangunan yang disebut Sub Pembangunan, setelah dikurangi satu SWP yang sudah menjadi bagian administratif Kota Tasikmalaya Keenam Sub Wilayah Pembangunan tersebut, meliputi:

1. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) Ciawi dengan wilayah pelayanan yang mencakup Kecamatan Ciawi, Kadipaten, Sukaresik, Sukawening,



Sukaratu, Pageurageung, Jamanis, Rajapolah, dan Cisayong dengan pusat Kota Ciawi. Kegiatan yang dikembangkan di SWP ini adalah :

- Perdagangan dari Pariwisata
- Perikanan air tawar
- Intensifikasi pertanian
- Agrowisata dan Argo Industri serta kerajinan rakyat
- Penambangan galian golongan C
- Pengembangan ternak sapi perah
- Industri kecil / kerajinan rakyat
- Konservasi hutan, tanah dan air

2. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) Manonjaya dengan wilayah pelayanan yang mencakup Kecamatan Manonjaya, Gunung Tanjung, Karangjaya, Jatiwaras, Cineam, dan Salopa dengan pusatnya di Kota Manonjaya. Kegiatan yang dikembangkan di SWP ini adalah :

- Intensifikasi peternakan unggas dan ternak kecil
- Pengembangan pertanian lahan kering
- Konservasi hutan, tanah dan air
- Pengembangan holtikultura
- Industri kecil / kerajinan rakyat
- Agroindustri
- Pertambangan rakyat

3. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) Singaparna dengan wilayah pelayanan yang mencakup Kecamatan Singaparna, Mengunreja, Sukarame, Cisaruni,

Sariwangi, Puspahiang, Leuwisari, Cigalontang, Salawu, Sukaraja dan Tanjungjaya, dengan pusat kota Singaparna.

- Pengembangan perikanan air tawar
- Pengembangan holtikultura dan palawija
- Pariwisata cagar budaya
- Penambangan galian golongan C
- Pengembangan ternak besar
- Konservasi hutan, tanah dan air
- Industri kecil / kerajinan rakyat

4. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) Taraju dengan wilayah pelayanan yang mencakup Kecamatan Taraju, Sodonghilir, Bojonggambir dengan pusat Taraju. Kegiatan yang dikembangkan di SWP ini adalah :

- Konservasi hutan, tanah dan air
- Perkebunan
- Agrowisata

5 Sub wilayah Pembanguna (SWP) Bantarkalong – Karangnunggal dengan wilayah pelayanan yang mencakup Kecamatan Bantarkalong, Culamega, Parung Ponteng, Bojongasih, Karangnunggal, Cibalong, dan Cipatujah dengan pusat Bantarkalong-Karangnunggal. Kegiatan yang dikembangkan di SWP ini adalah :

- Pusat Pemerintahan dan perkantoran
- Pariwisata

- Perkebunan
- Ekstensifikasi lahan besar
- Perikanan laut dan air payau
- Pertambangan galian C
- Industri kecil dan Agroindustri
- Konservasi hutan, tanah dan air

6 Sub Wilayah Pembangunan (SWP) Cikatomas dengan wilayah pelayanan yang mencakup Kecamatan Cikatomas, Pancatengah, dan Cikalong dengan pusat Kota Cikatomas. Kegiatan yang dikembangkan di SWP ini adalah :

- Pariwisata alam pantai
- Pengembangan tanaman kelapa
- Intensifikasi lahan kering
- Ekstensifikasi lahan basah
- Pengembangan ternak besar
- Perikanan laut dan air payau
- Pertambangan
- Industri kecil / kerajinan rakyat
- Konservasi hutan, tanah, dan air

Berdasarkan hirarkhinya, kota – kota di Kabupaten tasikmalaya di kelompokkan ke dalam 3 (tiga) hirarkhi sebagai berikut :



Kota hirarkhi I, meliputi Kota Bantarkalong-Karangnunggal dengan kegiatan utama pusat pemerintahan, pendidikan dan budaya, perdagangan, jasa, pariwisata serta industri kecil.

Kota Hirarkhi II, meliputi Kota Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Cikatomas, Taraju, dengan kegiatan utama perdagangan, pariwisata, pertanian lahan basah, perikanan air tawar, peternakan, palawija, hortikultura, perkebunan, industri kecil serta pertambangan galian C.

Kota Hirarkhi III, meliputi Kota Salopa, Tanjungjaya, Cisayong, Pagerageung, Rajapolah, Jamanis, Cineam, Cigalontang, Leuwisari, Salawu, Taraju, Sukaraja, Sodonghilir, Cibalong, Bojonggambir, Cipatujah, Cikalong dan pancatengah dengan kegiatan utama perikanan air tawar, agroindustri, industri kecil, perdagangan, pariwisata, peternakan sapi, perkebunan the, karet, kelapa, intensifikasi/ekstensifikasi pertanian lahan basah, hortikultura, pertambangan galian c dan konservasi hutan.

Sementara itu, kebijaksanaan struktur ruang wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, antara lain sebagai berikut :

1. Pengembangan Kota Hirarki I, diarahkan pada penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kegiatannya.
2. Pengembangan Kota Hirarki II, diarahkan pada percepatan pertumbuhan dan pengembangan kegiatan non pertanian serta penyusunan Rencana

Tata Ruang Kawasan (RTRK) yang dapat dijadikan acuan dan pedoman operasional dalam pelaksanaan pembangunan kota.

3. Pengembangan Kota Hirarki III, diarahkan untuk mendukung pusat – pusat Sub Wilayah Pembangunan melalui pengembangan kegiatan yang sesuai dengan fungsi kegiatan masing – masing kota.
4. Peningkatan peran serta pusat – pusat SWP sebagai pusat koleksi dan distribusi sebagai pusat pertumbuhan wilayah belakangnya.

### **C. Gambaran Potensi Yang Dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya**

Luas lahan baku pertanian Kabupaten Tasikmalaya sebesar 153.990 ha terdiri dari lahan sawah 49.656 ha dan lahan kering 104.334 ha. Lahan sawah seluas 49.656 ha terdiri dari sawah dengan irigasi 12.252 ha, irigasi desa 25.555, dan sawah tadah hujan 11.849 ha. Komoditas yang dapat ditanam yaitu padi dan palawija yang terdiri dari komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, serta buah – buahan dan sayuran. Terutama komoditas manggis yang menjadi unggulan, dibudidayakan di kecamatan Puspahiang. Salawu. Sukaraja, Salopa, dan Cibalong. Potensi lahan sebesar 10.750 ha baru dapat dimanfaatkan 1.411 ha (13 %) sehingga terdapat peluang pengembangan sebesar 8.952 ha. Produksi tahun 2002 sebesar 5.178 ton, sekitar 45 % sudah diekspor dengan Negara tujuan Korea, Malaysia. Saudi Arabia dll Kecamatan Puspahiang, sebagai sentra penghasil dan pemasaran Manggis, memiliki potensi lahan seluas 816 ha, sedangkan yang termanfaatkan baru sekitar 400 ha (50%). Sementara untuk produksi padi terdapat surplus sebesar 141.109,49 ton beras dari kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.



Potensi Pertanian di dukung oleh potensi sumberdaya manusia dan kelembagaan di bidang pertanian berupa :1.824 Kelompok Tani, 103 Gapoktan, 33 Koperasi Tani, 123 Kelompok Tani, 123 Kelompok Wanita Tani, 224 P3A Mitra Cai, dan 34 KUD.

## **POTENSI SEKTORAL**

### ***1. Perkebunan***

Luas areal perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya seluas 67.991.76 ha, meliputi perkebunan rakyat 62.775 ha, perkebunan besar swasta 3.032, 21 ha, dan perkebunan besar negara 2.184,55 ha. Komoditas yang dikembangkan yaitu : Kelapa, The Aren, Mendong, Pandan, rinu, cengkeh, Kapol, Kopi, dan Lada, Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung potensi perkebunan antara lain : 730 kelompok tanai, 8 buah koperasi, 17 pengusaha perkebunan, 1 unit pengolah minyak nilam, 27 uni pengolah the hijau, 4 unit pengolah the hitam, dan 13 unit pengolah karet.

### ***2. Peternakan***

Jenis ternak yang dikembangkan antara lain : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam, dan itik; dan luas tanah pengangonan 8.434,52 ha. Terutama ternak sapi potong yang dikembangkan di wilayah selatan. Potensi peternakan didukung 172 kelompok tani peternakan yang terdiri dari : 124 kelompok tani ternak pemula, 44 kelompok tani ternak lanjut, dan 4 kelompok tani ternak madya.



### 3. Perikanan dan Kelautan

Kawasan pantai membentang sepanjang 52,5 km diwilayah selatan meliputi 3 kecamatan (Cipatujah, Karangnunggal, dan Cikalong) Luas rawa 30 ha, dengan jumlah nelayan 1.415 orang, armada kapal 71 unit motor temple , 128 Kelompok tani Ikan Pemula, 42 Kelompok Tani Ikan Lanjut, 7 Kelompok tani Ikan Madya. Dan 2 Kelompok Tani Ikan Utama. Potensi Sumberdaya perikanan dan kelautan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Potensi cabang Usaha dan SDM Perikanan**  
**di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002**

No	Cabang Usaha/SDM	Potensi	Realisasi	%
1	Penangkapan Laut (ton) : Jalur I, II, III ZEE	6.640 5.770	259,7 0	3,91 -
2	Budidaya (ha): Tambak Tambak Biocrete Kolam  Ikan sawah Kolam Arus Deras (unit) Jaring Apung (unit)	200 1.500 5.000  12.863 69 60	12 0 4.468,56(Pembesaran) 344.65 (Pembenihan) 8.681 29 20	6 0 89,37 6,89 67.49 42.03 33,33

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya

Dari tabel di atas nampak bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi perikanan yang cukup lengkap selain potensi ikan laut juga potensi ikan darat.

Namun secara umum dari keseluruhan potensi yang dimiliki sebagian besar masih belum dapat digali (belum dapat direalisasikan).

#### **4. Kehutanan**

Luas Hutan Negara sebesar 43.863,82 ha, terdiri dari hutan produksi seluas 39.120,30 ha dan hutan lindung seluas 4.743,52 ha. Areal hutan produksi dibagi menjadi 3 kelas perusahaan yaitu kelas perusahaan jati seluas 14.039,28 ha, kelas perusahaan pinus 17.540,99 ha, dan kelas perusahaan mahoni seluas 7.540,03 ha. Luas hutan rakyat sebesar 23.626,21 ha dengan komoditi sengon, mahoni, dan bamboo.

Terrapin 6 Sub daerah Aliran Sungai : Sub DAS Citanduy Hulu 742,52 ha, Sub DAS Ciseel 7.258 ha, Sub DAS Ciwulan Hulu 16.172,38, Sub DAS Ciwulan Hilir 2.005 ha, Sub DAS Cilangla 181,01 ha, Sub DAS Cimedang 2.667,78 ha. Luas lahan kritis seluas 10.740 ha.

#### **5. Pariwisata**

Potensi – potensi obyek wisata di Kabupaten Tasikmalaya antara lain : Cpanas dan Wanawisata Gunung Galunggung, Lokasi khas Wisata Budaya Kampung Naga, Wisata Ziarah Pamijahan, dan keindahan kawasan pantai selatan.



**Tabel 3.2**  
**Potensi SDM Perikanan dan Kelautan**  
**di Kabupaten Tasikmalaya, 2002**

No	Cabang Usaha	Jumlah RTP (Orang)
3	Petani Ikan (orang )	
	- Kolam	68.550
	- Sawah	26.306
	- Kolam Air Deras	29
	- Perairan Umum	8.140
	- Tambak	12
4	Nelayan (Orang)	120
5	Pengusaha Ikan (Orang)	
	- Pedagang Ikan	2.700
	- Bandar Ikan Air Tawar	15
	- Bakul Ikan	18

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya

#### **6. Potensi Pertambangan**

Kabupaten Tasikmalaya dikenal memiliki potensi Bahan tambang yang belum dibagi dengan secara optimal, antara lain : Gypsum. Pasir. Zeolit. Feldspar, Andesit, Bentonit, Tanah Liat, Batu Kapur, dan Kaolin, Sebagian besar di Wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya.

**Tabel 3.3**  
**Perkembangan Kunjungan Wisatawan Ke Obyek Wisata**  
**Di Kabupaten Tasikmalaya, 2001 & 2002**

No	Nama Obyek Daerah Tujuan Wisata	Tahun 2001			Tahun 2002		
		Manca negara	Nusan tara	Jumlah	Manca negara	Nusan tara	Jumlah
1	Cipanas Galunggung	275	87.955	88.230	183	100.937	101.120
2	LK Neglasari/Kp Naga	217	7.875	8.590	2.540	7.488	10.028



3	LK Pamijahan	-	207.861	207.861	-	254.224	254.224
4	Sindangkerta	120	11.564	11.684	154	11.418	11.572
5	Karangtawulan	180	10.654	10.834	212	7.699	7.911
6	Cipatujah	120	13.433	13.533	142	10.866	11.008
7	Wanawisata Galunggung	275	77.799	78.074	43	90.471	90.514
		1.685	417.141	418.826	3.274	483.103	486.377

*Sumber : Kantor Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya*

**Tabel 3.4**  
**Komoditi Mineral Logam**

No	Jenis bahan Galian/Mineral	Lokasi bahan Galian	Keterangan
1	Emas	- Mineral logam emas dan logam dasar terdapat di jalur pegunungan selatan Tasikmalaya (Cineam, Salopa, Cikatomas, Cipatujah, Bantakalong, Karangnunggal, Taraju, Bojonggambir dan Salaju)	- Baru dilaksanakan para penambang rakyat skala kecil (SIPR) ditambang pada kedalaman max . 30 m pemilik SIPR berlokasi di blok Kec. Cineam dan Kec. Mekarjaya. - Hasil analisis 2 contoh bijih di daerah mineralisasi Cibuniasih (Cikatomas Pancatengah) diperoleh kadar Air sebesar 706.500 ppb dan 2.173.900 ppb
2	Pasir Besi	- Cipatujah dan Cikalong	- Merupakan Konsesi PT Aneka Tambang - Cadangan terindikasi sebesar 4.214.392,40 ton
3	Besi bertitan	- Dibratdaya Bantarkalong - Cikalong	- Cadangan belum diketahui - Cikalong, cadangan terindikasi 2.357.390 ton
4	Mangan	- Karangnunggal - Cipatujah, Cuikatomas, Bantarkalong, Cibalong	- Cadangan 2 juta ton - Cadangan belum diketahui

5	Emas, tembaga, timbal, seng, perak	- Berlokasi di Cikondang (Cineam), Neglasari (Cipatujah)	- Cadangan belum diketahui
6	Tembaga	- Blok Pasir, Nangela, Nangelasari, Cipatujah	- Daerah Pasir Nangela, Nangelasari, Cipatujah

Keterangan : Sumber data Dit. Sumber Daya Mineral, Bandung

**Tabel 3.5**

**Komoditi Mineral Non Logam**

No	Jenis Bahan Galian	Lokasi Bahan Galian	Keterangan
1	Perlit	Karangnunggal	Cadangan belum diketahui
2	Kaolin	Karaha – Kadipaten  Padawaras, Karangnunggal	Cadangan 1.025.400 ton telah diusahakan oleh PT. UNIKA Cadangan belum diketahui
3	Oniks	Ciharahas Cigumung	Belum diketahui
4	Belerang	Kawah Karaha dan Gn Galunggung	Cadangan 29.675 ton (Tipe sublimasi 20.000 ton, tipe endapan Lumpur 9.675 ton)
5	Bentonit	Karangnunggal  Manonjaya	Cadangan tereka 6 juta ton telah diusahakan Cadangan belum diketahui
6	Dolomit	Cibalong	Cadangan belum diketahui pasti
7	Barit	Pancatengah, dan Cineam	Cadangan belum diketahui (6 Ha di daerah Cineam dan selebihnya di daerah Pancatengah), pernah diusahakan
8	Zeolit	Karangnunggal, Cipatujah, Cikalong	Cadangan tereka 39.435.125 ton
9	Gypsum	Karangnunggal	Cadangan belum diketahui
10	Kayu terkersikan	Cipatujah	Cadangan belum diketahui
11	Batugamping	Sukaraja, Taraju, Sodong hilir, Salopa, Cikatomas	Cadangan ratusan juta ton
12	Marmer	Cigunung, Karangnunggal	Cadangan jutaan ton (di daerah Cigunung luas sebaran 50 Ha belum termasuk di daerah Karangnunggal
13	Kalsit	Cigunung	Cadangan belum diketahui



14	Kalsedon dan Agat	Cikarakas, Cigunung, Pancatengah, Cipatujah	Tersebar dengan cadangan cukup banyak (di daerah Cikarakas, Cigunung cadangan tereka 250.000 m3)
15	Fosfat	Sukaraja dan Deudeul, Taraju	Cadangan belum diketahui
16	Feldspar	Karangnunggal	Cadangan belum diketahui
17	Pasir	Sekitar kawasan sayap Gn Galunggung, Cipatujah (pasir sungai) dan daerah lainnya secara tersebar	Cadangan ratusan juta m3 (tersebar)
18	Andesit	Sekitar kawasan sayap Gn Galunggung, Cipatujah (pasir sungai) dan daerah lainnya secara tersebar	Cadangan ratusan juta ton
19	Sirtu	Sekitar kawasan sayap Gn Galunggung, Cipatujah (pasir sungai) dan daerah lainnya secara tersebar	Cadangan jutaan m3 (tersebar)
20	Tanah Liat	Tersebar di Karangnunggal, Bantarkalong, Cipatujah, Sukaraja, Cibeureum, Cisayong, Pagerageung	Cadangan jutaan ton Tanah liat di daerah Cipatujah, Bantarkalong sangat baik untuk bahan baku keramik

Keterangan : Sumber data Dit. Sumber Daya Mineral Bandung

## 7. *Industri dan Perdagangan*

Kabupaten Tasikmalaya terkenal dengan insutri kecil kerajinan seperti bordir, anyaman, meubel kayu, sutera alam. Secara keseluruhan jumlah sentra industri sebanyak 249, unit usaha 9.126, menyerap tenaga kerja sebanyak 79.099 orang, dengan nilai investasi sebesar Rp 46 milyar, yang terdiri dari industri kecil non formal, industri kecil formal, dan industri menengah.



**Tabel 3.6**  
**Potensi Industri Kabupaten Tasikmalaya**

No	Uraian	Tahun 2002
1	Sentra Unit Usaha Tenaga Kerja Nilai Investasi : Terdiri dari :	249 9.126 79.099 46.399.164.000
	a. Industri Kecil Non Formal	
	- Sentra	249
	- Unit Usaha	8.211
	- Tenaga Kerja	67.834
	- Nilai Investasi	Rp. 29.971.025.000
	b. Industri Kecil Formal	
	- Unit Usaha	912
	- Tenaga Kerja	10.986
	- Investasi	Rp 7.086.540.000
	c. Industri Menengah	
	- Unit Usaha	3
	- Tenaga Kerja	279
	- Investasi	Rp 9.341.599.000

Sumber : Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

**Tabel 3.7**  
**Beberapa Komoditi Industri Kerajinan**

No	Komoditi	Jumlah Sentra	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga	Jumlah Investasi (Rp.000)	Jumlah Produksi (Rp 000)
1	Bordir	26	1.043	12.135	12.409.653	219.436.270
2	Kerajinan Mendong	17	890	5.316	2.364.213	6.702.543
3	Anyaman Bambu	24	1.197	13.190	4.975.375	15.384.858
9	Sutera Alam	2	3	75	180.000	2.700.000

4	Meubel Kayu	6	127	819	370.391	8.345.100
5	Anyaman Pandan	14	654	14.212	5.890.590	5.850.925
6	Gula Aren	20	925	4.049	405.837	54.676.153
7	Gula Kelapa	13	205	2.330	349.500	36.279.350
8	Batik	1	17	50	72.250	374.400
9	Sutera Alam	2	3	75	180.000	2.700.000

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

Sedangkan potensi perdagangan, antara lain: Perusahaan yang terdaftar sebanyak 5.215 perusahaan, seperti tampak pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perkembangan penerbitan perijinan**

No	Uraian	Tahun 2002
1	TDP	5.215
2	SIUP	4.912
3	Eksport	US \$ 1.058.046,49
	Jumlah Eksportir	1 (PT. Hini Daiki)
4	Negara Tujuan	1 (Jepang)
5	Impor	US \$ 473.673,80
	Jumlah Importir	1 (PT. Hini Daiki)
6	Jumlah Negara	1
7	Negara Tujuan	(Jepang)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yaitu 5 pasar pemda, dan 28 pasar desa.



### 8. Koperasi

Jumlah koperasi sebanyak 527 unit, dengan jumlah asset Rp 103.094 milyar, dan Volume usaha Rp 105.951 Milyar.

**Tabel 3.9**

#### **Jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Tasikmalaya**

No	Uraian	Tahun 2002
1.	<i>Koperasi</i>	
	- Jumlah Koperasi (bh)	527
	- Jumlah Anggota (org)	131.557
	- Aset (juta)	103.094
	- Volume usaha (juta)	105.951
2	<i>UKM</i>	
	- Informal	22.810
	- PK (pengusaha kecil formal)	4.809
	- PM ( Pengusaha Menengah Formal )	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tasikmalaya

### 9. Badan Usaha Milik Daerah

Saat ini Kabupaten Tasikmalaya memiliki 2 Badan Usaha, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).

#### **a. PDAM Tirta Sukapura**

Saat ini cakupan pelayanan air bersih sebesar 39.09 % dengan jumlah pelanggan sebanyak 26.848. Sambungan Rumah (SR), distribusi air bersih 10.379,046 m3. Perusahaan ini mencatat laba bersih sebesar Rp 980,8 Juta pada Tahun 2002, hasil audit akuntan publik.



## **b. PD BPR**

PD BPR Kabupaten Tasikmalaya mengembangkan 3 jenis, yaitu : 23 buah BKPD, 7 buah Bank Pasar, dan 3 buah LPK. Dilihat dari tingkat kesehatan, 26 BPR sehat, 6 cukup sehat, dan 1 kurang sehat.

Kondisi PD BPR dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**

### **Kondisi PD BPR di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002**

	<b>BKPD</b>	<b>Bank Pasar</b>	<b>LPK</b>
Jumlah Lembaga	23	7	3
Asset ( Rp Milyar )	44,53	11,74	13,46
Pendapatan ( Rp Milyar )	14,99	3,96	4,47

Sumber : PD BPR Kabupaten Tasikmalaya

## **PRODUK UNGGULAN**

Pengembangan potensi berbasiskan pada sumber daya local yaitu karakteristik dan potensi unggulan daerah. Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan *Core Bisnis* yang terdiri dari : Sektor Agribisnis, Sektor Kelautan, Sektor Pertambangan, Sektor Industri kecil dan Menengah, Sektor Pariwisata.

### ***Sektor Agribisnis***

Komoditas unggulan agribisnis identik dengan komoditas unggulan di sector pertanian. Berdasarkan penelitian potensi unggulan di Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Universitas

Siliwangi, Komoditas unggulan di sector agribisnis, antara lain: Manggis, Salak, Cabai, Lada, Nilam, Persuteraan Alam, Budidaya Sengon, Sapi Potong, Ternak Domba, Ikan Gurame, serta komoditi-komoditi yang memiliki prospek pengembangan yang baik antara lain : Pandan, The, Kelapa, Kakao.

### **1. Manggis**

Manggis banyak dibudidayakan di kecamatan Puspahiang, Salawu Sukaraja, Salopa, dan Cibalong, Potensi lahan sebesar 10.750 ha baru dapat dimanfaatkan 1.411 ha (13 %), sehingga terdapat peluang pengembangan sebesar 8.952 ha. Produksi tahun 2002 sebesar 5.178 ton, sekitar 45 % sudah diekspor dengan Negara tujuan Korea, Malaysia, Saudi Arabia dll. Kecamatan Puspahiang, sebagai sentra penghasil dan pemasaran Manggis, memiliki potensi lahan seluas 816 ha, sedangkan yang termanfaatkan baru sekitar 400 ha (50%).

### **2. Salak**

Dalam percaturan salak tingkat nasional, Tasikmalaya merupakan salah satu sentranya yang lebih dikenal dengan Salak Manonjaya. Daerah penghasil dan pengembangan Salak Tasikmalaya terdapat di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Cibalong, Cineam, Manonjaya, Cibeureum, Kawalu dan Sukaraja dengan total luas areal salak local = 7.831 ha dan salak super = 350 ha. Salak yang dikembangkan adalah jenis unggul yang lebih dikenal dengan Salak Tasik Super. Produksi rata – rata 2,7 ton/ha dengan potensi produksi 3,5 ton/ha.



Peluang pasar dalam bentuk buah dipasarkan diluar Tasikmalaya, dan sebagian dijadikan bahan olahan seperti : dodol salak, manisan salak, sale salak, yang dikelola oleh Perusahaan Binangkit.

### **3. Cabai**

Sentra cabai di Kabupaten Tasikmalaya adalah Kecamatan Cisayong, Cigalontang, dan Leuwisari. Produksi cabai dari kecamatan – kecamatan tersebut memiliki karakteristik kebenaran dan kandungan air yang ideal sehingga banyak dimiliki oleh para pelaku pasar. Pola produksi cabai dari kecamatan – kecamatan tersebut memiliki karakteristik kebernasan dan kandungan air yang ideal sehingga banyak diminati oleh para pelaku pasar. Pola permintaan cabai relatif tetap sepanjang waktu dengan puncak permintaan menjelang hari raya Idul Fitri, harga mencapai Rp 30.000m-/Kg s/d Rp 50.000 / kg.

### **4. Lada**

Lada merupakan jenis rempah – rempah yang mempunyai permintaan cukup tinggi. Di Kabupaten Tasikmalaya pengembangan tanaman lada antara lain : Kecamatan Salopa, Manonjaya, Cineam, Cikatomas, Bantar kalong, Salawu, Cisayong, dan Cipatujah, dengan areal tanam seluruhnya diperkirakan mencapai 46 ha dengan produksi rata – rata 19,78 ton rata – rata /tahun. Peluang pasar lada selain memenuhi permintaan dalam negeri, lada juga banyak dibutuhkan oleh pasar luar negeri. Walaupun harga lada juga mengalami fluktuasi, namun harga terendah yang terjadi belum pernah mencapai Rp 25.000/kg harga tertinggi mencapai Rp 100.000 / kg.



## **5. Nilam**

Minyak nilam merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang memiliki pengembangan tanaman nilam antara lain di Kecamatan Salopa, Manonjaya, Cineam, Cikatomas. Pasar dunia saat ini membutuhkan sekitar 1.200 – 1.400 ton Minyak Nilam.

## **6. Persuteraan Alam**

Persuteraan alam merupakan rangkaian kegiatan agroindustri yang dimulai dari penanaman murben, pembibitan, pemeliharaan ulat sutera, permintaan benang, penenunan kain, sampai pada pemasaran Luas tanaman murbei di Tasikmalaya 1.141, 47 kg tersebar di 19 kecamatan, antara lain yang cukup besar di Kecamatan Pegerageung, Kadipaten, Salawu, Sodonghilir, Singaparna, sementara kecamatan yang masih potensial untuk pengembangan usaha tani persuteraan alam diantaranya Kecamatan Jatiwaras, Salopa, dan Tanjungjaya. Produksi kokon per tahun sebesar 8.742,88 kg.

## **7. Sengon**

Tanaman Sengon (Albasia) menyebar di wilayah Tasikmalaya Selatan dan Utara, antara lain : Kecamatan Salopa, Cikatomas, Pancatengah, Karangnunggal, Cipatujah, Ciawi, dan Pagerageung. Permintaan Kayu Albasia, bukan hanya didalam negeri, namun juga datang dari manca Negara. Dengan karakteristiknya kayu Albasia dapat digunakan sebagai bahan bangunan peralatan rumah tangga, bahan baku kertas, dan kayu lapis.

## **8. Sapi Potong**

Kabupaten Tasikmalaya potensial sebagai penghasil ternak sapi potong, yang banyak diusahakan di wilayah selatan. Walaupun tingkat produksi daging sapi terus meningkat dari tahun ketahun, namun masih belum dapat memenuhi permintaan untuk pasar local sekalipun. Permintaan/kebutuhan sapi potong Kabupaten Tasikmalaya sebesar 14.000 ekor/tahun atau 33 ekor/hari, sedangkan produksi/supply sapi potong local sebesar 2.100 ekor/tahun sisanya didatangkan dari luar daerah (Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan impor Australia).

## **9. Domba**

Usaha ternak Domba hampir menyebar dengan merata diseluruh kecamatan bagian utara dan bagian selatan. Usaha ternak domba dalam system usahatani cukup signifikan terhadap penerimaan petani. Disamping permintaan local, regional, dan internasional. Pasar ternak domba masih cukup terbuka untuk Negara – negara di Asia seperti : Brunai Darusalam, Malaysia, dan Singapura.

## **10. Gurame**

Sentra Budidaya Gurame di Tasikmalaya tersebar di beberapa kecamatan antara lain : Singaparna (50 ha), Padakembang (100 ha), Leuwisari (75 ha), Cisayong (60 ha), Manonjaya (17 ha). Kebutuhan local untuk konsumsi ikan Gurame Tasikmalaya sebesar 368 ton/tahun, dipenuhi oleh produksi sendiri 293 ton, kekurangannya dipasok dari Kota Tasikmalaya, Ciamis,



Subang, Indramayu, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Produksi benih Gurame sebesar 20.822.000 ekor/tahun, kebutuhan local akan benih sebesar 6.200.000 ekor/tahun, selebihnya dipasarkan ke Jakarta, Bogor, Subang, Indramayu, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

## **11. Pandan**

Pandan merupakan komoditi spesifik yang mempunyai keunggulan komparatif dan leuanggulan kompetitif. Digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan anyaman, peluang usaha pengembangan komoditi pandan sangat terbuka karena 80 % atau sebesar 370,56 ton/tahun kebutuhan bahan baku serat pandan masih didatangkan dari luar Tasikmalaya dengan harga yang tinggi dan pasokan terbatas. Sentra penanaman pandan di Kabupaten Tasikmalaya, meliputi Kecamatan Cibalong, Pagerageung, Rajapola, dan Ciawi. Peluang pasar serat daun pandan untuk memenuhi kebutuhan pengrajin local dimana 85 % spply bahan baku masih didatangkan dari daerah luar Kabupaten Tasikmalaya.

## **12. Teh**

Sentra perkebunan teh terdapat di Kecamatan Taraju, Sodonghilir, Bojonggambir, Cagalontang dan Culamega, seluas 6.162,32 ha dengan produksi per tahun mencapai 7.108,6 ton the olahan. Pemasaran langsung ke pembeli di sukabumi untuk disupplay ke pabrik teh Sosro di Jawa Tengah.



### **13. Kelapa**

Areal tanamankelapa tersebar di 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dengan luas areal 14.735 ha. Produk mentah sebesar 70.610 ton/tahun atau 13.683 ton/tahun hasil olahan. Potensi tanaman kelapa antara lain di Kecamatan Cikalong, Cipatujah, Karangnunggal, Cibalong, Cikatomas, Pancatengah, Cineam. Pemasaran dijual langsung pada pembeli dari Bandung, Jakarta dan kota – kota lainnya.

### **14. Kakao**

Sentar penanaman Kakao terdapat di Kecamatan Culamega dan Cikatomas dengan produksi hasil olahan sekitar 24 ton/tahun dengan pemasaran langsung ke pengumpul di Kota Tasikmalaya.

### **15. Ayam Ras**

Pada Tahun 2002, produksi yang dihasilkan peternak ayam ras terdiri dari DOC Broiler dan DOC pejantan sebanyak 18.255.821 ekor. Dari jumlah tersebut yang diserap oleh pasar local Kabupaten Tasikmalaya sebesar 2.891.040 ekor (sekitar 15% dari produksi) setara dengan 4.047.456 kg daging ayam. Yang dikeluarkan ke pasar luar Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Jabotabek dan sekitar Bandung, 15.464.781 ekor sentra dengan 21.650,7 ton daging ayam.

Sentra pengembangan ternak ayam di Kecamatan Leuwisari, Singaparna, Sukaratu, Cibalong, Padakembang dan Pagerageung.

## ***Sektor Kelautan***

Wilayah pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya sangat potensial untuk pengembangan usaha tambak dengan komoditi : udang karang, kerapu, kakap merah, dan ikan tuna

### **1. Udang Karang**

Produksi udang karang atau yang lebih dikenal dengan lobster saat ini masih sangat tergantung pada hasil penangkapan yang menggunakan cara – cara yang sederhana, hal ini berimplikasi pada produktivitas yang rendah.

### **2. Kerapu**

Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas hasil laut yang bernilai ekonomis tinggi. Ikan kerapu hidup di daerah karang atau pasir campur karang., dengan dasar karang yang keras dan dihuni oleh binatang invertebrata, habitat seperti ini dapat ditemui di pantai selatan Tasikmalaya. Untuk menghasilkan ikan kerapu sesuai permintaan pasar, harus dilakukan penggemukkan ( fattening/pada jarring apung).

### **3. Kakap Merah**

Ikan Kakap Merah selain dapat hidup di lautan lepas, juga dapat hidup di tambak (air payau) bahkan di air tawar sekalipun, sehingga dapat dibudidayakan. Budidaya Kakap sudah dapat dilakukan



dengan berhasil, baik pembenihan maupun pembesarannya. Pembesaran Kakap dapat diusahakan dengan jarring apung dengan kepadatannya 6-8 kg/m<sup>2</sup>.

#### 4. Ikan Tuna

Ikan Tuna merupakan komoditas kelautan yang banyak diminati, terutama untuk konsumsi masyarakat golongan menengah keatas. Hingga saat ini, Ikan Tuna masih dihasilkan dari kegiatan penangkapan. Keberhasilan penangkapan sangat ditentukan oleh Keterampilan mengenai pola tingkah laku ikan tuna yang berkaitan dengan makan, suhu, salinitas, arus, dan waktu kawin. Selain itu juga ditentukan oleh komponen unit penangkapan.

### *Sektor Pertambangan*

Bahan tambang yang potensial dikembangkan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain zeolit, fospat, dan batu gamping.

#### 1. Zeolit

Cadangan zeolit di Tasikmalaya merupakan bagian dari pegunungan selatan yang membentang mulai dari Kecamatan Cikalong, Karangnunggal, sampai Cipatujah. Eksploitasi zeolit sebagian besar dilakukan oleh masyarakat berupa penambangan rakyat.



## **2. Fosfat**

Produksi fosfat digunakan untuk pembuatan pupuk, makanan tambahan ternak, produk makanan, dan minuman. Cadangan deposit fosfat cukup besar terdapat di Deudeul, Cipatujah, dan Cikalong.

## **3. Gamping**

Wilayah – wilayah yang memiliki cadangan batu gamping adalah Kecamatan Cibalong, Perungponteng, Taraju, Karangnunggal, Cipatujah, Cikatomas, dan Cikalong.

### ***Sektor Industri Kecil dan Menengah***

Seperti diketahui Kabupaten Tasikmalaya terkenal dengan industri kecil kerajinan anyaman, oleh sebab itu produk kerajinan yang menjadi andalan antara lain : anyaman mendong, anyaman pandan, anyaman bamboo, dan bordir.

#### **1. Anyaman Mendong**

Memiliki 890 unit usaha dan 17 sentra produksi, antara lain di Rajapolah, Salopa, Cibalong, dan Manonjaya. Nilai investasi - Rp 2,36 Milyar, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5 ribu orang, pemasaran 90 % dalam negeri dan 10 % luar negeri. Dibutuhkan promosi yang lebih aktif untuk meningkatkan pasar luar negeri.

## **2. Anyaman Pandan**

Lokasi sentra di Rajapolah, Cibalong, Karangnunggal, Manonjaya. Nilai investasi Rp 5,89 Milyar, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14 ribu orang, pemasaran 70 % dalam negeri dan 30 % luar negeri.

## **3. Anyaman Bambu**

Memiliki 1.197 unit usaha di 24 sentra produksi, antara lain di Leuwisari, Salawu, dan Singaparna. Nilai investasi mencapai Rp 4,97 Milyar, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13 ribu orang, pemasaran 80 % dalam negeri dan 20 % luar negeri.

## **4. Bordir**

Memiliki 1.043 unit usaha di 26 sentra produksi, antara lain di Sukaraja, Salopa, Singaparna, Karangnunggal, dan Cikatomas. Nilai investasi mencapai Rp 12,4 Milyar, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12 ribu orang, pemasarannya local dan regional.

### ***Sektor Pariwisata***

Obyek wisata yang potensial dikembangkan di Kabupaten Tasikmalaya yaitu : Gunung Galunggung, Kampung Naga, Pamijahan, dan Pantai Selatan

#### ***1. Kawasan Wisata Gunung Galunggung***



Gunung Galunggung merupakan gunung berapi yang menjadi mascot pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Mempunyai ketinggian 2.167 m dpl, terdapat banyak fasilitas dan aktivitas wisata yang ditawarkan saat ini, antara lain : daya tarik wanawisata meliputi areal seluas 120 ha, pemandian air panas (Cipanas), serta kandungan belerang pada air panas untuk pengobatan dan kesehatan (cure tourism).

## **2. *Lokasi Khas Wisata Budaya Kampung Naga***

Kampung Naga merupakan perkampungan tradisonal dengan luas areal sekitar 15 ha. Lokasi Khas Wisata Budaya Kampung Naga terletak pada ruas jalan yang menghubungkan Tasikmalaya – Garut. Secara administrative kampung Naga termasuk kampung Legok Dage Desa Neglasari Kecamatan Salawu. Event upacara yang ada berupa upacara sasihan meliputi : Idul Adha (10 Dzulhijah), Mendak Taun (28 Muharram), Maulid Nabi (12 Rabiul ‘ Awal), Irro Mi’raj (27 Rajab), Nisfu Sya’ban (1 Ruwah). Idul Fitri, 1 Syawal, dan Upacara Pedaran (setiap 8 tahun sekali) jatuh pada bulan Maulud tahun 2008.

## **3. *Lokasi Khas Wisata Ziarah Pamijahan***

Pamijahan merupakan lokasi khas Wisata Ziarah yang terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, sekitar 65 km dari Kota Tasikmalaya ke arah selatan, dengan luas areal sekitar 25 ha. Lokasi Khas Wisata Ziarah ini kental dengan cara – cara ritual



agama, hari – hari besar Islam merupakan puncak ramainya pengunjung ziarah ke Pamijahan.

#### **4. Kawasan Wisata Pantai Selatan**

Pantai Selatan Tasikmalaya terkenal dengan pantai Cipatujah. Obyek dan dayatarik Wisata Pantai Cipatujah meliputi area kurang lebih 115 ha. Pada akhir tahun biasanya diadakan Hajat Lembur (Pesta Nelayan). Kawasan Pantai Selatan, selain obyek dan daya tarik wisata Cipatujah terdapat pula obyek dan daya tarik wisata lainnya seperti : Taman Lengser Pantai Sindangkerta dan Konservasi Penyu, Pantai Pamayangsari dengan Perkampungan Nelayannya, Taman Bubujang Indah, Pantai Ciheras dan Pantai Karang Tawulan.

# BAB IV

## KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN

### A. Indikator Bidang Ekonomi

#### 1. *Pemerataan Pendapatan*

Indikator kinerja pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator pertama dalam hal ini adalah tingkat pemerataan pendapatan sebagai representasi dari keadilan ekonomi. Selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2002 (pasca pemekaran). Sebagai ukuran tingkat pemerataan yang digunakan adalah Gini Ratio. Makin rendah gini ratio, makin tinggi tingkat pemerataan. Berdasarkan data yang diperoleh, Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya secara umum mengalami penurunan, artinya telah terjadi peningkatan pemerataan. Namun demikian, dibandingkan dengan Gini ratio Jawa Barat, nampak Kabupaten Tasikmalaya masih lebih tinggi.

**Tabel 4.1**  
**Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya dan Propinsi Jawa Barat**

Tahun	Gini Ratio		
	Tasikmalaya	Jabar	Ratio
2000	0.239	0.245	0.975510204
2001	0.249	0.235	1.059574468
2002	0.218	0.201	1.084577114

Sumber: Ikhtisar Data Pembangunan Jawa Barat, 2003



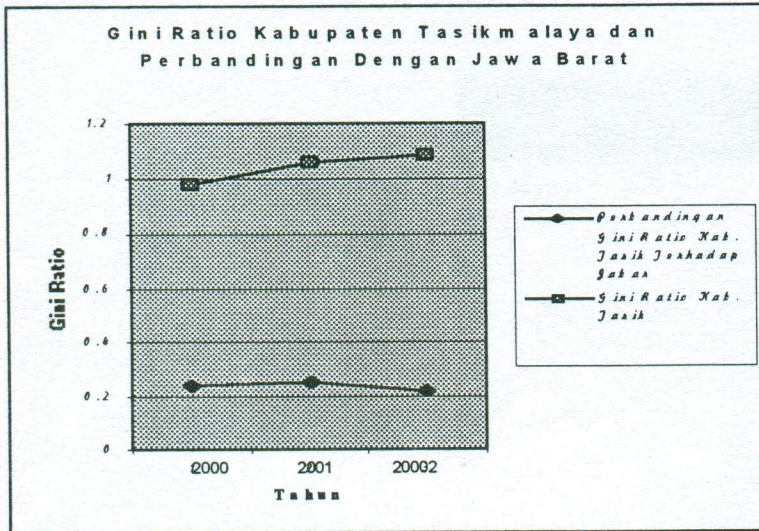
Dikaitkan dengan kebijakan pemekaran wilayah, penurunan Gini Ratio atau peningkatan pemerataan tersebut disebabkan pada awalnya (sebelum pemekaran) terjadi kesenjangan pendapatan antara masyarakat di wilayah perkotaan yang merupakan wilayah Kota Tasikmalaya saat ini, dengan masyarakat di wilayah pedesaan yang merupakan sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya saat ini.

Kondisi seseperti ini sebenarnya sudah diakui oleh berbagai pihak terkait dengan kondisi kesenjangan atau kemiskinan relatif yang terjadi di Indonesia. Para ahli membagi ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia ke dalam 4 kategori, yaitu:

1. Ketimpangan antar daerah; Dalam hal ini terdapat daerah-daerah yang mempunyai pendapatan sangat tinggi, namun disisi lain terdapat daerah-daerah yang pendapatannya sangat rendah. Banyak faktor yang menyebabkan hal demikian, antara lain perbedaan potensi yang dimiliki.
2. Ketimpangan antara Kota dan Desa; Dalam hal ini masyarakat perkotaan secara rata-rata memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan.
3. Ketimpangan antara Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur; Dalam hal ini Indonesia Bagian Barat secara rata-rata masyarakatnya memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia Bagian Timur.
4. Ketimpangan antar individu dalam satu kawasan tertentu; Dalam hal ini terdapat individu atau kelompok masyarakat yang mempunyai



pendapatan sangat tinggi, namun di sisi lain terdapat masyarakat dengan pendapatan yang sangat rendah.



Dalam konteks pemekaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya, nampak sebelumnya terjadi ketimpangan-ketimpangan ini, terutama ketimpangan antara Kota dan Desa, sehingga tatkala pemekaran wilayah dilakukan terjadi pebgelompokkan yang relatif lebih homogen, yaitu masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dengan rata-rata pendapatan yang relatif lebih rendah dengan kelompok masyarakat Kota Tasikmalaya dengan pendapatan yang relatif lebih tinggi.

## 2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah dengan struktur produksi didominasi oleh sektor pertanian. Dengan demikian, kontribusi sektor

pertanian terhadap PDRB dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan. Pada Tahun 1996 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 27%, sedangkan pada Tahun 2000 dan 2001 (pasca dilakukannya pemekaran wilayah), meskipun luas wilayah kabupaten tasikmalaya mengalami penurunan, namun kontribusi sektor pertanian justru mengalami peningkatan masing-masing menjadi 38%, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**

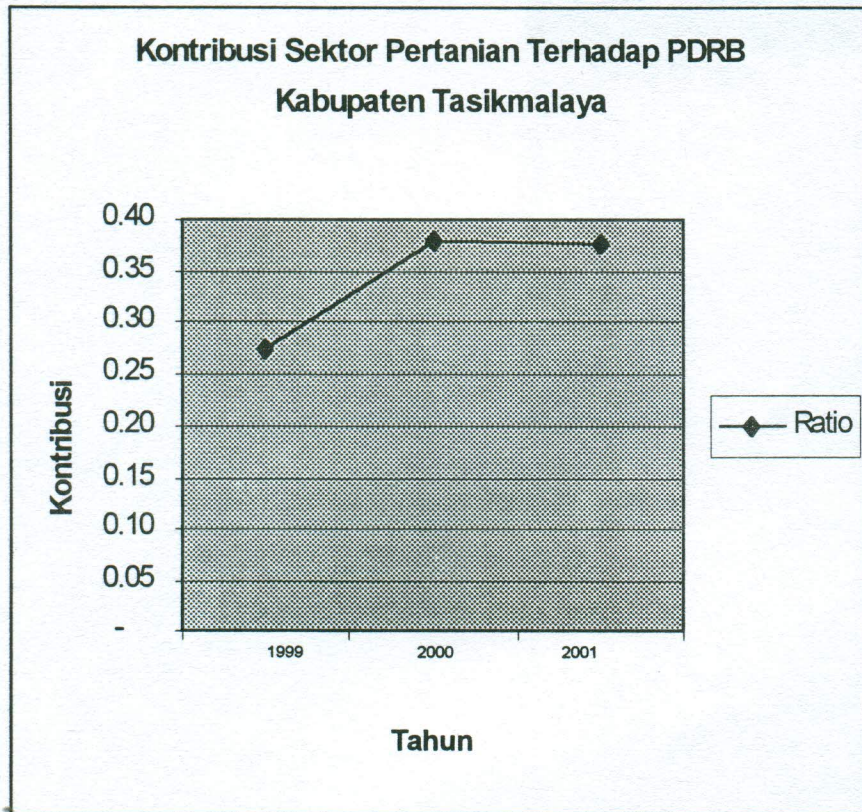
Tahun	Sektor Pertanian	PDRB	Ratio
1996	574,019.12	2,096,347.83	0.27
2000	490,198.48	1,289,886.86	0.38
2001	499,293.62	1,327,884.67	0.38

Sumber: Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka

Peningkatan kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB setelah dilakukannya pemekaran wilayah merupakan indikasi bahwa penyebaran arel pertanian sebelum dilakukannya pemekaran wilayah, lebih banyak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan hal ini sangat logis karena Kota Tasikmalaya merupakan daerah perkotaan yang sebagian sebagian aktivitas ekonomi masyarakatnya bergerak pada sektor perdagangan dan jasa. Satu hal yang menarik adalah meskipun kontribusi nilai tambah sektor pertanian terjadi peningkatan dibandingkan sebelum pemekaran wilayah, namun selama dua



tahun periode pasca pemekaran wilayah justru tidak mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah, tidak berhasil mempercepat perkembangan sektor yang dominan (sektor pertanian) di Kabupaten Tasikmalaya.



### 1. *Tingkat Pengangguran*

Tingkat pengangguran merupakan indikator lain untuk melihat kinerja pembangunan. Meskipun tingkat pengangguran juga terkait dengan dimensi

sosial, sehingga sering kali juga dijadikan sebagai indikator sektor sosial, namun dalam hal ini lebih dilihat dari dimensi ekonomi. Pengangguran merupakan dampak dari ketidaktersediaan lapangan kerja, dan sempitnya lapangan kerja merupakan dampak dari rendahnya investasi. Berdasarkan data Tahun 2000 sampai dengan 2002, tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan, sejalan juga dengan peningkatan tingkat pengangguran di Jawa Barat secara umum, sebagaimana terlihat pada tabel 4.3. Meskipun sama-sama mengalami peningkatan tingkat pengangguran, namun tingkat pengangguran di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya.

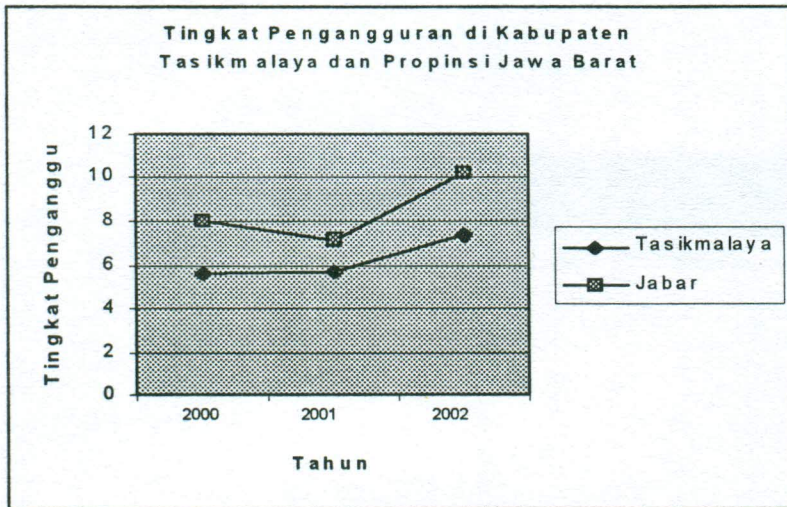
**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**di Kabupaten Tasikmalaya dan Jawa Barat**

Tahun	Pengangguran Terbuka		
	Tasikmalaya	Jabar	Ratio
2000	5.61	8.01	0.700374532
2001	5.69	7.14	0.796918768
2002	7.32	10.23	0.715542522

Sumber: Ikhtisar Data Pembangunan Jawa Barat, 2003

Dikaitkan dengan kebijakan pemekaran wilayah, nampak dilihat secara kasar Kabupaten Tasikmalaya lebih mampu menahan perubahan kesempatan kerja dari gejolak fluktuasi ekonomi selama periode 2000-2002. Hal ini sesuai dengan karakteristik sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di Kabupaten Tasikmalaya. Secara teoritis dapat dijelaskan sebagai berikut:





Penduduk dilihat dari dimensi geografi dibagi kedalam dua kategori yaitu penduduk usia kerja dan penduduk non usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi kedalam dua kategori lagi yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, angkatan kerja dibagi ke dalam dua kategori yaitu angkatan kerja yang bekerja dan penganggur (pencari kerja). Selanjutnya, angkatan kerja yang bekerja dibagi kedalam dua kategori lagi yaitu yang bekerja penuh dan setengah menganggur (*disguised unemployment*). Dalam kaitannya dengan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya, dengan karakteristik daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, rendahnya tingkat pengangguran dibandingkan Propinsi Jawa Barat, sebenarnya pengangguran terbuka. Sementara itu, angkatan kerja yang bekerja namun tidak penuh (setengah menganggur) diakomodasi oleh sektor pertanian.

## **B. Indikator Bidang Sosial**

Indikator kinerja pembangunan di bidang sosial dapat dibagi ke dalam beberapa sektor antara lain yang secara langsung menyentuh masyarakat adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, kualitas dan jangkauan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan yang hendak dicapai dari suatu proses pembangunan.

### ***1. Angka Partisipasi Sekolah***

Angka Partisipasi Sekolah (APS) bagi anak usia 7-12 tahun merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan pada sektor pendidikan pada Bidang Sosial. APS merupakan prosentase anak-anak usia sekolah yang bersekolah terhadap keseluruhan anak-anak usia sekolah pada usia tertentu. Dengan demikian, makin tinggi APS, berarti makin baik kinerja pembangunan bidang pendidikan.

Di Kabupaten Tasikmalaya, nampak APS sejak Tahun 2000 hingga 2002 mengalami peningkatan bahkan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan APS Jawa Barat pada periode yang sama. Pada saat APS Jawa Barat menurun sekalipun yaitu pada Tahun 2001, APS Kabupaten Tasikmalaya justru mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

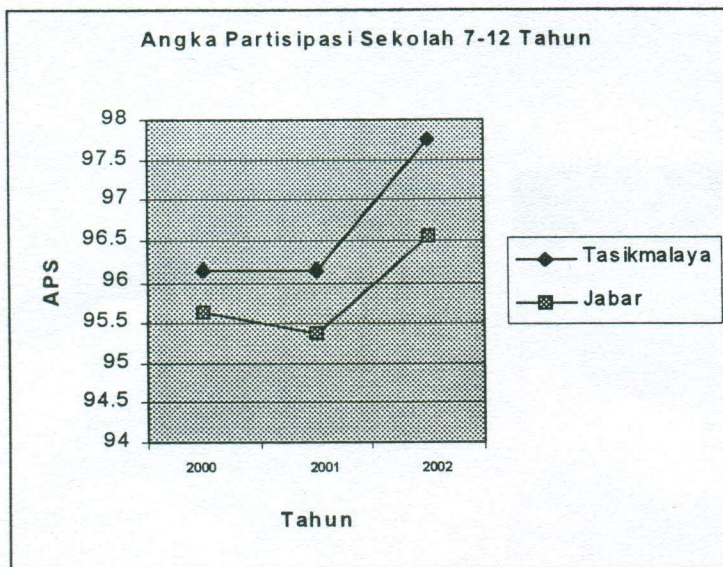


**Tabel 4.4**  
**Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun**  
**di Kabupaten Bandung**

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah		
	Tasikmalaya	Jabar	Ratio
2000	96.15	95.63	1.005437624
2001	96.16	95.37	1.008283527
2002	97.77	96.56	1.012531069

Sumber: Ikhtisar Data Pembangunan Jawa Barat, 2003

Memperhatikan data sebagaimana tertera pada tabel di atas, nampak bahwa kebijakan pemekaran wilayah telah berdampak kepada peningkatan APS di Kabupaten Tasikmalaya. Peningkatan APS yang sangat signifikan ini disebabkan oleh penurunan jumlah anak sekolah dasar (SD) yang sangat signifikan, hal ini tercermin dari meskipun APS meningkat namun jumlah murid SD selama tahun 2001 dan 2002 mengalami penurunan, yaitu dari 174.032 menjadi 176.795. Selain itu kebijakan pemerintah baik nasional maupun daerah, berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun juga telah mendorong pengkatan APS bukan hanya di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga di Jawa Barat pada umumnya. Dikaitkan pemekaran wilayah, nampak bahwa terjadi ketidakmerataan jumlah anak usia sekolah antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ternyata di daerah perkotaan secara umum lebih banyak usia sekolah dibandingkan dengan di daerah pedesaan yang menjadi wilayah Kabupaten Tasikmalaya.



## 2. Angka Melek Huruf

Indikator bidang sosial pada sektor pendidikan yang kedua adalah angka melek huruf (AMH). Angka melek huruf merupakan perbandingan jumlah penduduk yang mampu membaca dibandingkan dengan keseluruhan penduduk. Berdasarkan data tahun 2000 sampai dengan 2002, angka melek huruf Kabupaten Tasikmalaya pertama-tama meningkat lalu menurun. Sementara itu, AMH Jawa Barat selama periode tersebut mengalami peningkatan yang lebih tinggi dan tidak mengalami penurunan. Meskipun demikian AMH Kabupaten Tasikmalaya pada ketiga tahun tersebut tetap berada di atas AMH Jawa Barat.

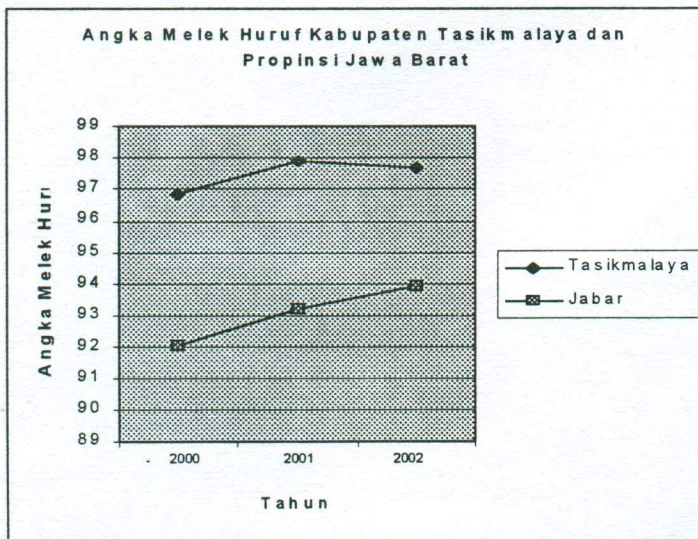


**Tabel 4.5**  
**Angka Melek Huruf Kabupaten Tasikmalaya**  
**dan Jawa Barat**

Tahun	Angka Melek Huruf		
	Tasikmalaya	Jabar	Ratio
2000	96.81	92.07	1.051482568
2001	97.89	93.22	1.050096546
2002	97.67	93.94	1.039706195

Sumber: Ikhtisar Data Pembangunan Jawa Barat, 2003

Kebijakan pemekaran wilayah, meskipun tidak secara langsung berpengaruh terhadap perubahan AMH, namun melihat perkembangan yang terjadi, nampak bahwa kebijakan tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan perubahan AMH, hal ini terbukti dengan perubahan yang meningkat lalu menurun kembali.



### 3. Rasio Murid Terhadap Guru

Untuk melihat kinerja pembangunan pada Sektor Pendidikan antara lain dapat digunakan ratio guru terhadap murid. Makin tinggi ratio guru terhadap murid berarti makin tinggi peluang penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas, karena guru merupakan faktor utama yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan anak. Asumsi ini didasari pemikiran bahwa jika rata-rata murid yang ditangani oleh setiap guru sedikit atau dengan kata lain ratio guru terhadap murid besar, maka proses belajar mengajar akan makin baik dan daya sampai materi oleh guru atau daya serap materi oleh murid akan tinggi.

**Tabel 4.6**  
**Ratio Guru Terhadap Murid**

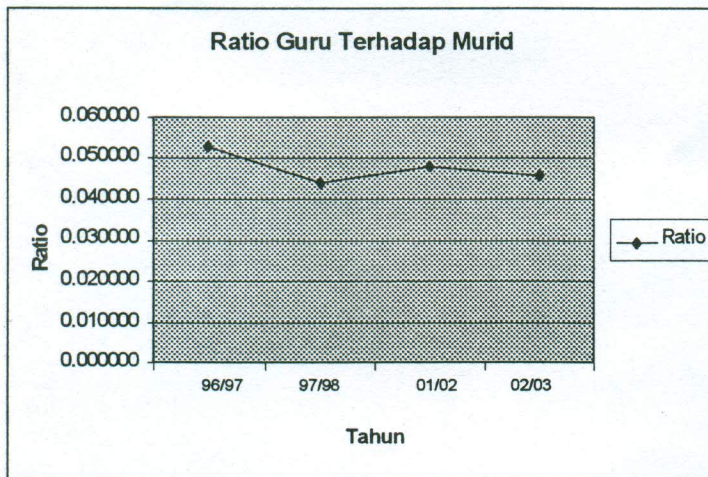
<b>Tahun</b>	<b>Guru SD</b>	<b>Murid</b>	<b>Ratio</b>
96/97	12006	226775	0.052942
97/98	9870	225281	0.043812
01/02	8343	174032	0.047939
02/03	8099	176795	0.045810

Sumber: Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka

Nampak pada tabel bahwa ratio guru terhadap murid sebelum dan setelah ditetapkannya pemekaran wilayah mengalami fluktuasi, namun secara umum terjadi penurunan. Ini artinya bahwa, *pertama*, distribusi guru dan murid di Kabupaten Tasikmalaya sebelum dilakukan pemekaran relatif tidak merata antara wilayah yang menjadi Kabupaten Tasikmalaya dan wilayah yang



menjadi Kota Tasikmalaya. Wilayah yang menjadi Kabupaten Tasikmalaya saat ini, yang sebagian besar pedesaan memiliki rasio guru terhadap murid lebih kecil dibandingkan Kota Tasikmalaya, sehingga begitu dimekarkan, kesenjangan antara Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dalam rasio guru terhadap murid terjadi. *Kedua*, meskipun kewenangan bidang pendidikan telah diberikan kepada daerah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, namun dalam hal pengangkatan dan pendistribusian guru, Pemerintah Pusat masih tetap memiliki peran yang besar, dan hal ini terbukti dengan adanya guru pusat dan guru daerah.



Dilihat dari indikator ini, dan dikaitkan juga dengan sebagian kewenangan penempatan guru berada pada pemerintah daerah, maka kebijakan pemekaran wilayah hanya menimbulkan kesenjangan dalam layanan pendidikan terhadap masyarakat. Masyarakat di Kota Tasikmalaya makin mempunyai peluang yang lebih besar sedangkan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya makin mempunyai peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan layanan pendidikan.

#### 4. *Rasio Penduduk Terhadap Dokter*

Dalam sektor kesehatan, kinerja pembangunan dapat dilihat dari keberhasilannya menciptakan kondisi masyarakat yang sehat. Indikator tersebut merupakan *outcomes* dari berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan, sehingga dalam jangka pendek indikator tersebut kurang dapat bisa diukur. Untuk itu, indikator antara dari berbagai program dan kegiatan sektor kesehatan antara lain dapat dilihat dari ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, dan ketersediaan layanan bagi masyarakat ini akan sangat tergantung kepada pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak lain dari tenaga kesehatan seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Makin banyak tenaga kesehatan, makin tinggi peluang masyarakat untuk mendapatkan layanan yang berkualitas sehingga makin tinggi kesempatan bagi masyarakat untuk hidup sehat. Atas dasar hal tersebut, rasio jumlah penduduk terhadap dokter dijadikan sebagai indikator kinerja pembangunan pada sektor kesehatan ini.

Ratio penduduk terhadap dokter menunjukkan berapa rata-rata penduduk yang harus dilayani oleh setiap orang dokter. Dengan demikian, makin sedikit rasio penduduk terhadap dokter, makin tinggi peluang masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Sebaliknya ratio dokter terhadap penduduk menunjukkan berapa peluang seorang penduduk untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh dokter. Makin tinggi ratio dokter terhadap penduduk, makin tinggi peluang seseorang untuk mendapatkan layanan kesehatan dari dokter. Data empirik Tahun 1996, 1997, 2001, dan



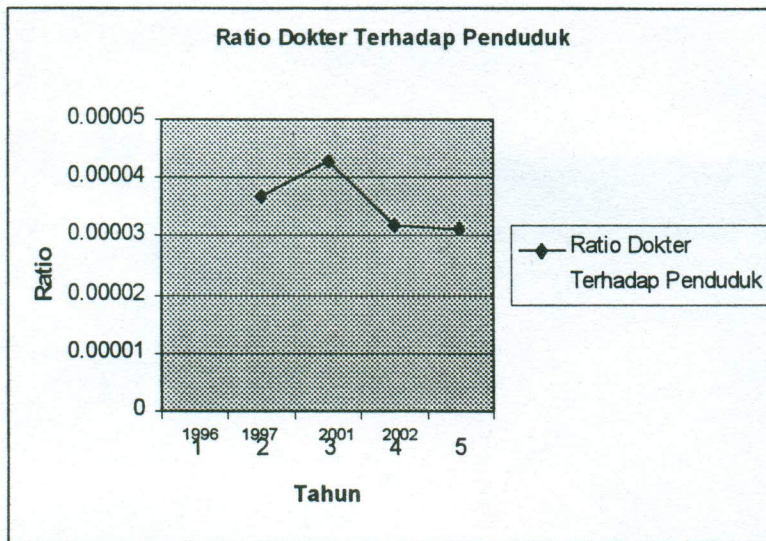
2002 menunjukkan bahwa secara umum ratio dokter terhadap penduduk mengalami penurunan yang sangat berarti, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.7. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan peluang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, atau dengan kata lain telah terjadi peningkatan beban seorang dokter dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan kinerja yang tidak baik dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

**Tabel 4.7**  
**Ratio Penduduk Terhadap Dokter**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pddk</b>	<b>Juml.Dokter</b>	<b>Ratio</b>
1996	1,896,546	70	0.00003691
1997	1,905,421	82	0.00004304
2001	1,535,859	49	0.00003190
2002	1,582,793	49	0.00003096

Sumber: Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka

Memperhatikan data pada tabel di atas nampak bahwa kebijakan pemekaran wilayah telah memperlihatkan terjadinya kesenjangan distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Penurunan ratio dokter terhadap penduduk menunjukkan bahwa saat Kabupaten Tasikmalaya belum dimekarkan, dokter-dokter lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Tasikmalaya yang saat ini menjadi Kota Tasikmalaya. Dilihat dari sisi ini, dan dikaitkan dengan kewenangan ijin praktek dokter yang melibatkan pemerintah daerah, maka kebijakan pemekaran wilayah hanya menimbulkan kesenjangan pelayanan kesehatan.



### C. Indikator Bidang Sarana dan Prasarana

#### 1. *Rasio Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik Terhadap Seluruh Rumah Tangga*

Dalam bidang sarana dan prasarana dasar, kinerja pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator penting. Indikator penting yang biasa digunakan dalam berbagai kajian kinerja pembangunan antara lain adalah ketersediaan jaringan listrik bagi masyarakat. Listrik dijadikan indikator penting dalam hal ini karena realita menunjukkan bahwa listrik memegang peranan penting dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap listrik sangat tinggi.



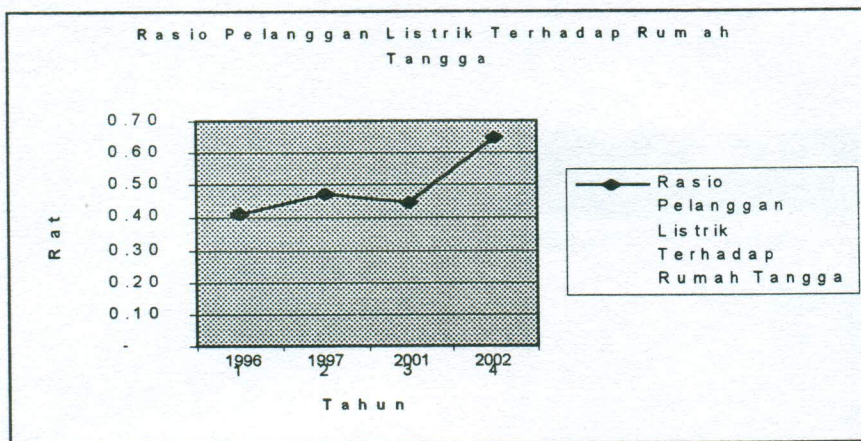
Berdasarkan data empirik Tahun 1996, 1997, 2001, dan 2002, secara umum baik jumlah pelanggan secara absolut maupun secara relatif yaitu ratio pelanggan terhadap keseluruhan rumah tangga mengalami peningkatan kecuali pada Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan layanan listrik bagi masyarakat. Data mengenai pelanggan listrik dan rasionya terhadap keseluruhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

**Tabel 4.8**  
**Pelanggan Listrik, Rumah Tangga, dan Ratio Pelanggan Listrik Terhadap Keseluruhan Rumah Tangga**

<b>Tahun</b>	<b>Pelanggan Listrik</b>	<b>Rumah Tangga</b>	<b>Ratio</b>
1996	193,133	466,610	0.41
1997	219,684	468,378	0.47
2001	190,407	426,804	0.45
2002	289,120	448,143	0.65

Sumber: Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa kebijakan pemekaran wilayah telah meningkatkan konsentrasi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan listrik masuk desa. Artinya, program pembangunan listrik masuk desa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak sebelum dilakukannya pemekaran wilayah lebih terkonsentrasi di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, karena memang sebagian besar program listrik masuk desa adalah untuk wilayah pedesaan yang notabene berada di kabupaten.



## 2. Panjang Jalan

Panjang jalan merupakan indikator lain untuk mengukur kinerja pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana. Indikator ini dianggap penting karena panjang jalan berhubungan dengan kemudahan akses masyarakat terhadap aktivitas khususnya perekonomian, dan makin mempertinggi hubungan atau keterkaitan antar wilayah, sehingga mobilisasi penduduk meningkat dan taraf hidup masyarakat pun makin meningkat. Selama periode 1999 sampai dengan 2002 panjang jalan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan, meskipun telah dilakukan kebijakan pemekaran wilayah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

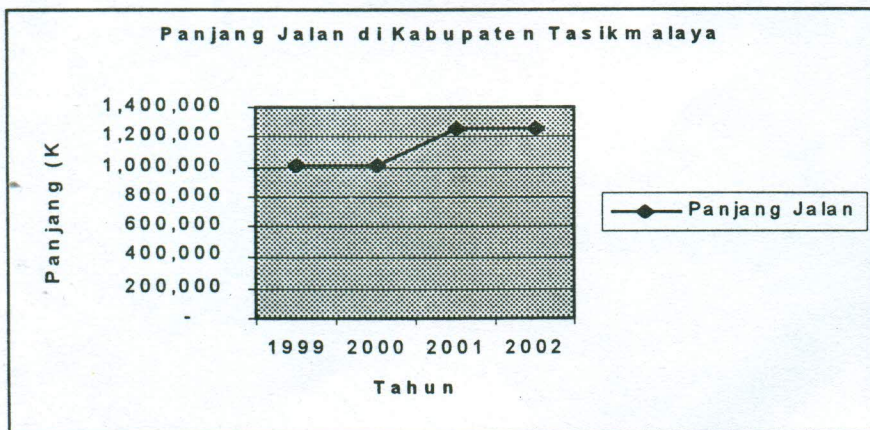


**Tabel 4.9**  
**Panjang Jalan di Kabupaten Tasikmalaya**

Tahun	Panjang Jalan
1999	1,010,662
2000	1,010,662
2001	1,260,127
2002	1,260,127

Sumber: Kabupaten Tasik Dalam Angka

Sebagaimana nampak pada tabel di atas, dan dikaitkan dengan kebijakan pemekaran wilayah, nampak bahwa kebijakan tersebut telah meningkatkan kinerja pembangunan dalam bidang perhubungan khususnya berupa peningkatan panjang jalan. Terjadinya peningkatan indikator ini dapat dijelaskan bahwasannya dalam kondisi sebelum dilakukannya pemekaran wilayah, keterbatasan prasarana jalan terjadi di wilayah pedesaan, sehingga yang menjadi sasaran pembangunan prasarana jalan waktu itu adalah daerah pedesaan. Kemudian, setelah dilakukan pemekaran wilayah, pembangunan



prasarana jalan menjadi lebih terkonsentrasi di daerah pedesaan, sehingga berdampak terhadap peningkatan panjang jalan yang signifikan.

#### **D. Indikator Bidang Keuangan Daerah: *Pendapatan Asli***

Satu hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan pemekaran wilayah adalah dampak dari kebijakan tersebut terhadap struktur keuangan daerah. Yang sering menjadi sorotan dalam hal ini adalah mengenai Pendapatan Asli Daerah, bahkan hal ini secara formal dalam peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pembentukan suatu daerah otonom baru.

Seringnya indikator ini disoroti terkait dengan kebijakan pemekaran wilayah, nampaknya karena indikator ini sering dianggap sebagai indikator kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunannya. Padahal, dalam realita tidak ada satu daerah pun yang pembiayaan pembangunannya didominasi oleh PAD. Sebagian besar penerimaan daerah dalam APBD bersumber dari dana perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus. Sementara itu, PAD, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah porsinya relatif kecil. Adapun komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa PAD merupakan salah satu komponen penerimaan daerah.

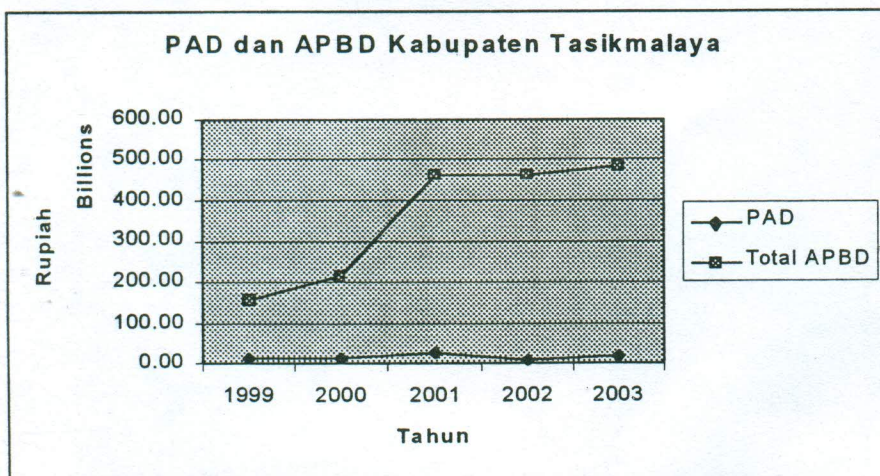


**Tabel 4.10**  
**PAD, Total APBD, dan Ratio PAD Terhadap APBD**  
**di Kabupaten Tasikmalaya**

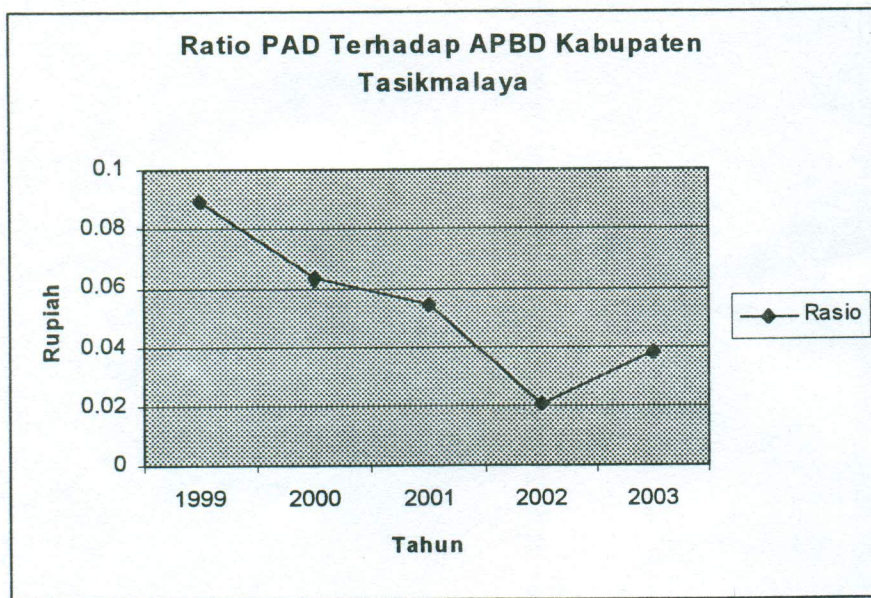
Tahun	PAD	Total APBD	Rasio
1998/1999	13,941,267,956.87	156,350,831,394.00	0.089166574
1999/2000	13,739,529,788.83	216,828,054,934.71	0.063366015
2001	25,306,071,892.14	461,956,384,327.89	0.054780219
2002	9,565,733,046.33	460,969,328,807.76	0.020751344
2003	18,659,211,505.32	484,827,824,700.32	0.038486264

Sumber: Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka & LPJ Bupati Tasikmalaya

Data PAD dan perbandingannya dengan total penerimaan dalam APBD di Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun anggaran 1998/1999 hingga tahun anggaran 2002 dapat dilihat pada tabel 4.10. Sebagaimana terlihat pada tabel tersebut nampak bahwa proporsi PAD dalam APBD sangatlah kecil, selama 5 tahun pengamatan rata-rata hanya kurang dari 10% total APBD.



Dalam grafik juga nampak bahwa PAD hanya merupakan bagian kecil saja dari total penerimaan yang ada dalam APBD. Kemudian satu hal yang juga dapat disimak adalah bahwa sejak dilakukannya kebijakan pemekaran wilayah, penerimaan daerah dalam APBD terus meningkat, sementara itu PAD secara umum mengalami penurunan. Akibatnya ratio PAD terhadap APBD mengalami penurunan yang sangat drastis.



Peningkatan kembali pada tahun 2003 antara lain disebabkan adanya kesepakatan antara Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah induk dengan Kota Tasikmalaya sebagai daerah baru, untuk memberikan sebagian (lebih kurang 30%) APBD Kota Tasikmalaya kepada Kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya, dalam hal keuangan, kabupaten induk yang semestinya memberikan bantuan atau pembinaan kepada daerah baru malah sebaliknya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan umum yang dapat diambil dari kajian ini adalah bahwasannya pemekaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjadi Kabupaten Tasikmalaya (daerah induk) dengan Kota Tasikmalaya (daerah baru) telah membuktikan bahwa sebelum terjadinya pemekaran wilayah terjadi kesenjangan antara wilayah yang ada di perkotaan dengan wilayah yang ada di pedesaan. Kesenjangan tersebut terjadi pada berbagai dimensi kehidupan dan sektor perekonomian, antara lain kesenjangan pendapatan, kesenjangan pendidikan, kesenjangan kesehatan, dan kesenjangan sarana dan prasarana umum. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan pemerataan pendapatan di Kabupaten Tasikmalaya pasca pemekaran wilayah. Hal ini diduga karena terjadinya pengelompokan masyarakat ke dalam dua wilayah, yaitu kelompok masyarakat dengan rata-rata pendapatan lebih tinggi di Kota Tasikmalaya dan kelompok masyarakat dengan rata-rata pendapatan yang lebih rendah di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemekaran wilayah telah berdampak terhadap peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, namun peningkatan

kontribusi tersebut hanya sebagai akibat bahwa areal pertanian sebelum dilakukannya pemekaran terdapat di wilayah daerah induk. Sementara itu, kebijakan pemekaran tidak mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor pertanian.

3. Rendahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya pasca pemekaran wilayah lebih disebabkan oleh kemampuan sektor pertanian, yang sesuai dengan karakteristiknya, mampu mengakomodasi pencari kerja. Dengan kata lain, rendahnya tingkat pengangguran terbuka diimbangi oleh tingginya setengah menganggur (*disguised unemployment*) di sektor pertanian.
4. Walaupun nampak terjadi perubahan dalam semua indikator sektor pendidikan, namun perubahan tersebut lebih disebabkan karena penyebaran guru, murid, dan penduduk usia sekolah antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya semula tidak merata, sehingga ketika dilakukan pemekaran wilayah, yang terjadi adalah kesenjangan antara Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dalam indikator-indikator sektor pendidikan tersebut.
5. Dalam Bidang Kesehatan, pemekaran wilayah pun cenderung hanya akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam layanan kesehatan, karena distribusi sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan semula tidak merata, melainkan lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.



6. Kebijakan pemekaran wilayah telah berdampak positif terhadap daerah yang wilayahnya sebagian besar pedesaan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti listrik dan jalan. Hal ini disebabkan program-program pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar baik sebelum maupun sesudah pemekaran wilayah diorientasikan kepada wilayah pedesaan. Dengan demikian, pemekaran wilayah berakibat terhadap pengkonsentrasian pembangunan sarana dan prasarana dasar tersebut di wilayah pedesaan.
7. Dampak pemekaran wilayah yang paling terlihat secara signifikan adalah terhadap keuangan daerah, khususnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Setelah pemekaran wilayah, Kabupaten Tasikmalaya di satu pihak hanya memiliki PAD yang sangat kecil, sementara Kota Tasikmalaya memiliki PAD yang relatif lebih besar. Hal ini terjadi karena konsentrasi sumber-sumber PAD yang potensial terjadi di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, daerah induk yang seharusnya mampu membina daerah baru pecahannya, dalam hal PAD tidak mampu untuk melakukan pembinaan, bahkan sebagian PAD Kota Tasikmalaya (lebih kurang 30%) diserahkan kepada Kabupaten Tasikmalaya.

## **B. Rekomendasi**

### **1. Rekomendasi Umum (Untuk Pemerintah Pusat)**

Dalam menetapkan kebijakan pemekaran suatu wilayah hendaknya dilakukan studi terdahulu bukan hanya menyangkut kelayakan daerah baru yang akan

dibentuk, tetapi juga dampak yang akan ditimbulkan pada daerah induk. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan yang makin mencolok antara daerah induk dengan daerah baru. Kasus pemekaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya hendaknya menjadi pelajaran, bahwa sebelum dilakukan pemekaran terdapat kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Lalu setelah dilakukan pemekaran, apabila pemerintah daerah tidak berupaya untuk mengejar ketinggalan, maka kesenjangan akan makin lebar, karena mobilisasi potensi masing-masing daerah akan tersekat dengan perbedaan teritorial kedaerahan.

## *2. Rekomendasi Khusus (Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya)*

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu segera melakukan berbagai upaya untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat menjadi kompensasi terhadap hilangnya potensi PAD yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Potensi yang perlu dioptimalkan tersebut terutama potensi yang dapat menarik investasi, sehingga peningkatan pendapatan nantinya bukan berasal dari pembebanan terhadap masyarakat umum, melainkan terhadap sektor usaha. Optimalisasi potensi tersebut dengan cara pemerintah daerah mengorientasikan pengeluaran pembangunan kepada sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan potensi wilayah.

Dalam kaitan ini pula, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara mantap potensi masing-masing kawasan. Atas dasar itu, upaya pemacuan



pertumbuhan kawasan dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi potensi intinya.

Kekeliruan periode sebelumnya dengan mengkonsentrasikan pembangunan di perkotaan nampaknya jangan diulang lagi, karena pengalaman membuktikan bahwa telah terjadi kesenjangan antar kawasan. Daerah perkotaan yang hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Tasikmalaya dahulu, mempunyai perkembangan yang bagus, sementara kawasan pedesaan yang merupakan sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya masih relatif terbelakang. Dengan kata lain, upaya pembangunan pedesaan yang sudah mulai dirintis sejak beberapa tahun terakhir, misalnya dengan upaya pelebaran dan penambahan jalan, listrik masuk desa, dan program lainnya perlu dilanjutkan, karena program-program tersebut ternyata yang mampu menyelamatkan kinerja pembangunan Kabupaten Tasikmalaya pasca pemekaran wilayah.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku dan Jurnal

- Bryant, Coralie & Louise G. White, *Managing Development in The Third World* (diterjemahkan oleh Rusyanto L. Simatupang, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*), LP3ES, Jakarta, 1989.
- Leftwich, Richard H & Ansel M. Sharp, *Economics of Social Issues*, Forth Edition, Business Publication Inc., Dallas, Texas, USA, 1980.
- McKenzie, Richard B, *Economic Issues In Public Policies*, McGraw-Hill, USA, 1980.
- Pemkab Tasikmalaya dan BAPEDA, *Kajian Pembentukan Daerah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya*, 2000
- Pemkab Tasikmalaya dengan ITB, *Studi Penelitian Ibukota Kabupaten Tasikmalaya*, 2002
- Prud' Homme, *The Dangers of Decentralization*, The World Bank Research Observer, August, 1995
- Richardson, Harry W., *Elements of Regional Economics*, terjemahan Paul Sitohang "Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional", Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1991.
- Sobandi, Baban, *Kebijakan Pembangunan Daerah: Antara Pertumbuhan dan Efisiensi*, Jurnal Wacana Kinerja, 2000
- Sobandi, Baban, *Etika Kebijakan Publik: Moralitas Profetis Profesionalisme Birokrasi*, Humaniora Utama Pers, Bandung, 2004.
- Wahyu Utomo, Triwidodo, *Demokrasi dan Ukuran Wilayah*, Media Indonesia, 2000.



## **Dokumen Resmi**

1. Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya, 2001-2005
2. Tasikmalaya Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 1996
3. Tasikmalaya Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 1997
4. Tasikmalaya Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2001
5. Tasikmalaya Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2002
6. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Taskmalaya, Akhir Masa Jabatan 1996/1997 s.d. 2001
7. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Taskmalaya, Tahun 2001
8. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Taskmalaya, Tahun 2002
9. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Taskmalaya, Tahun 2003
10. Ikhtisar Data Pembangunan Jawa Barat, Bapeda Propinsi Jawa Barat, 2003



